



**PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU**



HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si
Bupati Mamuju

ADO MASUD, S.Sos
Wakil Bupati Mamuju

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2023

⋮⋮⋮

TA. 2024



PEMERINTAH
KABUPATEN MAMUJU



HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.Si
Bupati Mamuju

ADO MASUD, S.Sos
Wakil Bupati Mamuju

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP TAHUN 2023

...

TA. 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT yang maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif dokumen ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi misi Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026. Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Mamuju terwujud atas kerjasama dan kerja keras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2023 ini bermanfaat dan dapat dijadikan potret terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2023 serta dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Mamuju, Maret 2024

BUPATI MAMUJU,

HJ. SITI SUTINAH SUHARDI

Ikhtisar Eksekutif

Penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (***Clean and good governance***) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitivitas pemerintahan terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintahan Kabupaten Mamuju berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (***Good Governance***) dan berorientasi kepada hasil (***Result, Oriented Government***) sesuai dengan kewenangan dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat di uji dan dapat diandalkan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran strategis, dengan 22 (dua puluh dua) indikator kinerja utama. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 Sasaran dan 4 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran dengan capaian 50 % kategori baik, 1 indikator sasaran dengan capaian 25 % kategori cukup dan 1 indikator sasaran dengan capaian 25 % kategori Kurang.

2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 Indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran dengan capaian 50 % kategori baik sekali dan 2 indikator sasaran dengan capaian 50 % kategori baik.

3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 4 indikator sasaran dengan capaian 66,7 % kategori baik sekali dan 1 indikator sasaran dengan capaian 16,7 % kategori baik serta 1 indikator sasaran dengan capaian 16,7 % kategori Kurang.

4. Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran dengan capaian 100 % kategori baik.

5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja :

- Capaian indikator sasaran, sebanyak 2 indikator sasaran dengan capaian 16,7 % kategori baik sekali, 4 indikator sasaran dengan capaian 66,8 % kategori Baik dan 1 indikator sasaran dengan capaian 16,7 % kategori cukup.

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 7 indikator sasaran atau 31,81 persen bermakna Baik Sekali, 11 indikator sasaran atau 50,00 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup dan 2 indikator sasaran atau 9,09 persen Bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen. yang dimana hal tersebut tercipta disebabkan adanya salah satu Indikator yang mencapai jauh melebihi daripada target daerah yakni terdapat pada Indikator sasaran Pertumbuhan Investasi dengan capaian sebesar 455,00 Persen.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar hukum	1
C. Gambaran Umum Kondisi Daerah	3
1. Letak Wilayah Geografi	3
2. Iklim	7
3. Kependudukan	8
4. Ketenagakerjaan.....	11
D. Pertumbuhan Ekonomi	14
E. Kondisi Pemerintah	17
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	29
A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026	29
1. Visi	29
2. Misi	30
3. Tujuan dan Sasaran	30
4. Strategi dan Arah Kebijakan	36
5. Strategi	36
B. Arah Kebijakan Tahunan.....	42
C. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	43
D. Perjanjian Kinerja	49
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	48
A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	52
B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	55
C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	82
Realisasi Pendapatan menurut jenis pendapatan.....	82
1. Pendapatan Asli Daerah	83
2. Pendapatan Transfer	88

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	90
BAB IV. PENUTUP	94
A. Kesimpulan dan Saran	94
B. Strategi Peningkatan Kinerja	95

LAMPIRAN :

1. Pernyataan telah Direviu Oleh Inspektorat Kabupaten Mamuju
2. Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
4. LRA tahun 2023
5. Matrix Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 -2026
6. SOP Penyusunan LKJIP Kabupaten Mamuju Tahun 2023
7. Realisasi Target Indikator Kinerja RPJMD Tahun 2023

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan, (2023)	6
Tabel 1.2	Pengamatan Unsur Iklim Kabupaten Mamuju Menurut Bulan di Stasiun BMKG Majene, 2023	7
Tabel 1.3	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju,2023	9
Tabel 1.4	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis KelamindiKabupatenMamuju,2023	12
Tabel 1.5	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mamuju, 2023	12
Tabel 1.6	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mamuju, 2023	13
Tabel 1.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2017–2022	16
Tabel 1.8	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (ribu), 2017–2022	16
Tabel 1.9	Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2023	16
Tabel 1.10	Urusan Pemerintahan	21
Tabel 1.11	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Mamuju, Desember 2022dan Desember 2023	25
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	31
Tabel 2.2	Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.3	Arah KebijakanPembangunan	42
Tabel 2.4	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun2021-2026	44
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	50
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja InstansiPemerintah	53
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran	54
Tabel 3.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	54

Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	56
Tabel 3.5	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	62
Tabel 3.6	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	62
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	65
Tabel 3.8	perbandingan Target dan Capaian IKLH Kabupaten Mamuju tahun 2023	65
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	69
Tabel 3.10	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	78
Tabel 3.11	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7 Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah	78
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8 Meningkatnya investasi daerah	80
Tabel 3.13	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	80
Tabel 3.14	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Meningkatnya kemandirian desa	82
Tabel 3.15	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2023	83
Tabel 3.16	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023	84
Tabel 3.17	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	85
Tabel 3.18	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2023	86
Tabel 3.19	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023	87
Tabel 3.20	Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023	88
Tabel 3.21	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	90
Tabel 3.22	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administrasi Kabupaten Mamuju	3
Gambar 1.2	Luas Daerah dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten menurut Kecamatan (%), 2023	4
Gambar 1.3	Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju(%),2023	5
Gambar 1.4	Piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2023	10
Gambar 1.5	Persentase Penduduk PerKecamatan di Kabupaten Mamuju,2023	11
Gambar 3.1	Raport IKLH Kabupaten Mamuju Tahun 2023	67
Gambar 3.2	Peta indeks Resiko Bencana di Indonesia	68

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Gambaran Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat (%), 2023	14
Grafik 1.2	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi menurut Kabupaten di Sulawesi Barat, 2019-2023	15
Grafik 1.3	Komposisi Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Golongan dan Jenjang Jabatan di Kabupaten Mamuju, 2023	24
Grafik 1.4	Komposisi Anggota Perwakilan Rakyat menurut Partai dan jenis kelamin di Kabupaten Mamuju, 2023	28

BAB I PENDAHULUAN

➤ Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat. Laporan kinerja Kabupaten Mamuju Tahun 2023 telah tertuang didalam laporan pelaksanaan RPJMD 2021-2026 Kabupaten Mamuju. Dengan demikian Laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi umpan balik bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selanjutnya.

➤ Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
2. Undang- undang No 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Nomor : DPA / A.1 / 4.01.0.00.0.00.01.0000 / 001 / 2024 tentang Koordinasi dan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

➤ Gambaran Umum Kondisi Daerah

1. Letak Wilayah Geografis

Kabupaten Mamuju terletak di sebelah Barat Pulau Sulawesi tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Secara Geografis Kabupaten Mamuju terletak di posisi 10 38' 110" - 20 54' 552" Lintang Selatan dan 110 54' 47" - 130 5' 35" Bujur Timur dari Jakarta; (00 0' 0" Jakarta = 1600 48' 28" Bujur TimurGreen Wich).

Secara administrasi, Kabupaten Mamuju berbatasan dengan :

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju Tengah;
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Luwu Utara);
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa dan Provinsi Sulawesi Selatan (Kabupaten Tana Toraja);
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

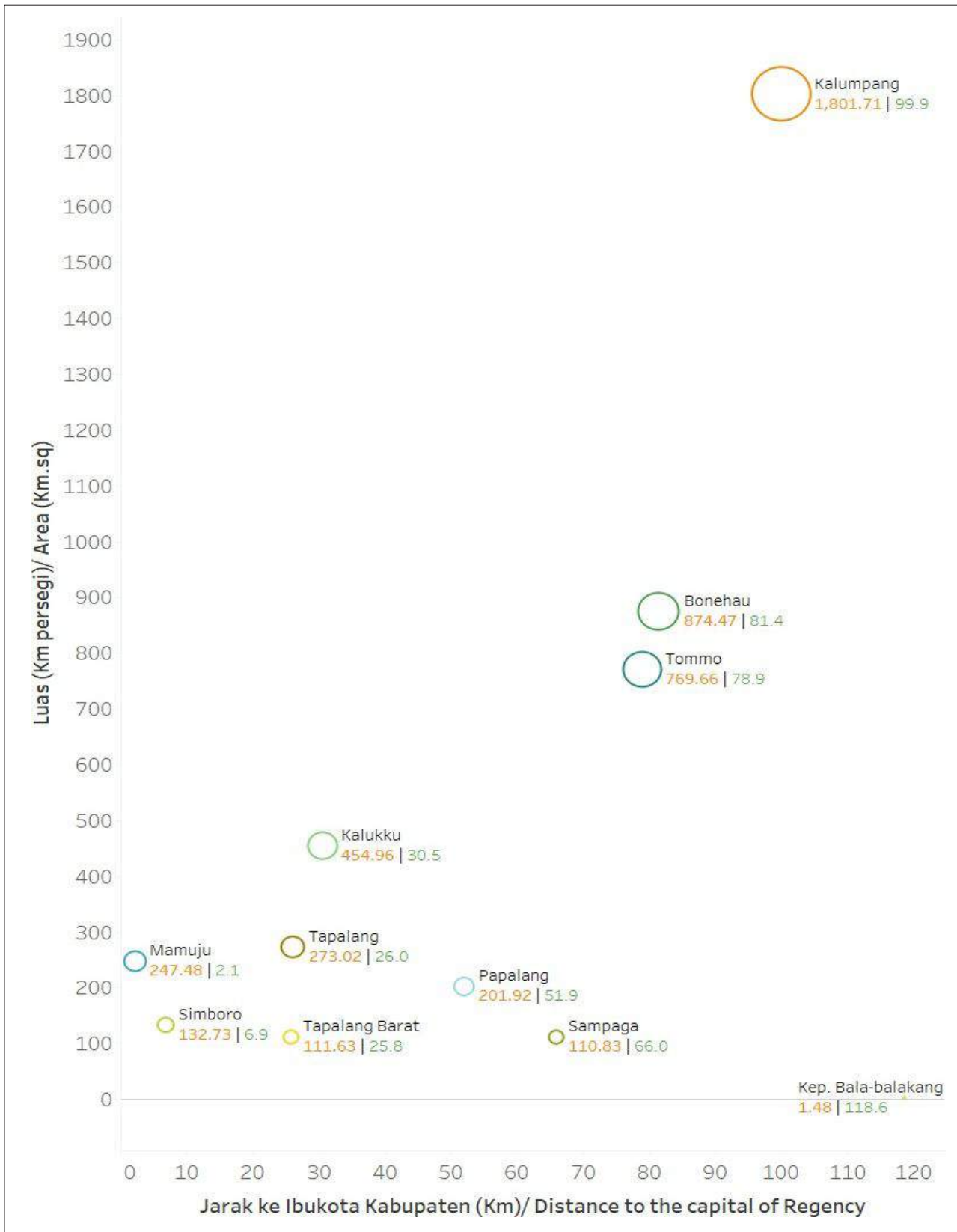
Gambar 1.1
Peta Administrasi Kabupaten Mamuju



Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 4.979,89 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 11 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalumpang dengan luas 1.801,71 km² atau 36,18

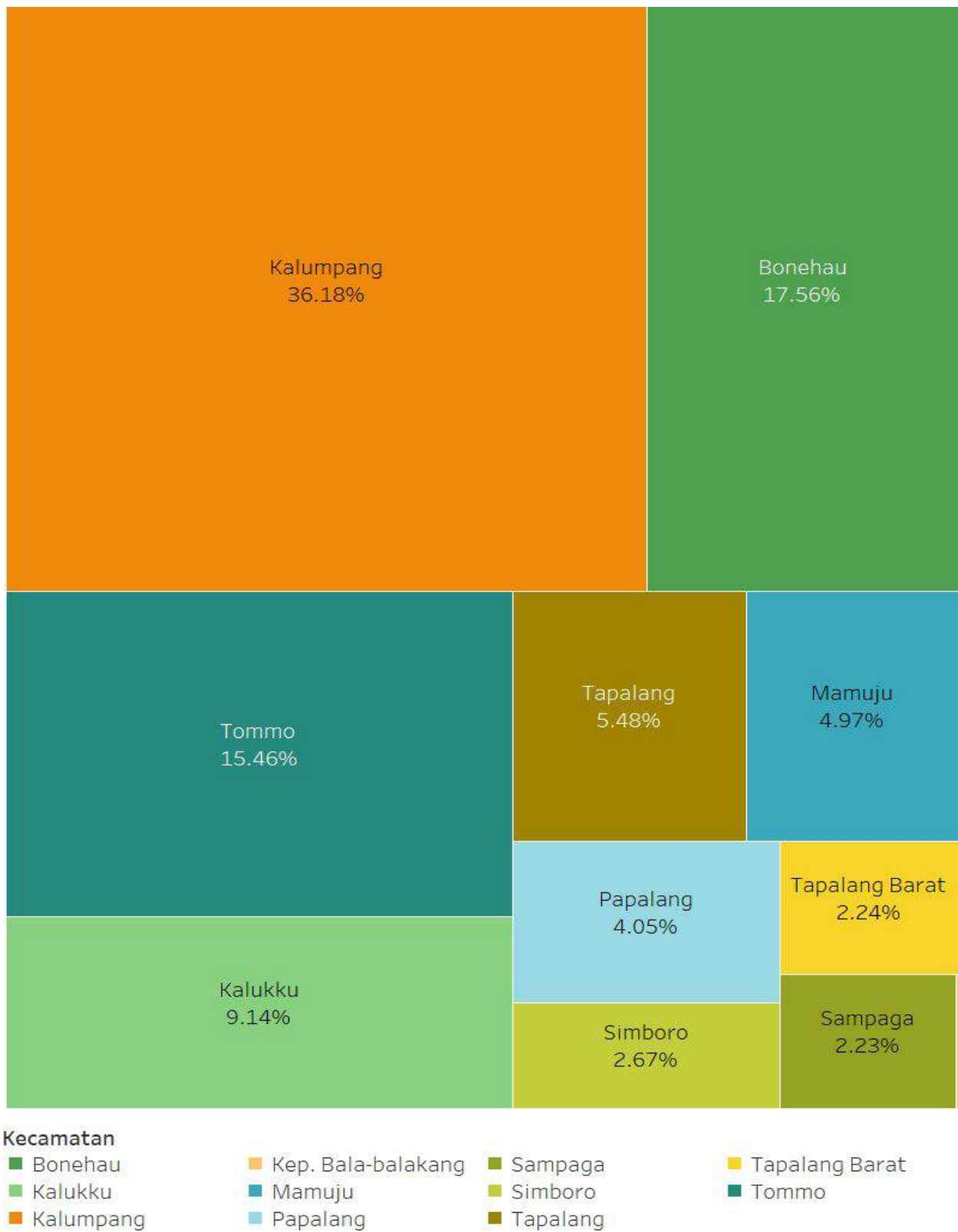
persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju. Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Bala Balakang dengan luas 1,48 km² atau 0,03 persen. Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Mamuju adalah Kecamatan Kepulauan Balabalakang yaitu 188,62 km.

Gambar 1.2
Luas Daerah dan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten menurut Kecamatan (%), 2023



Sumber/Source: BPS, Estimasi luas dan jarak berdasarkan hasil Pendataan Potensi Desa 2018 / BPS, Estimations

Gambar 1.3
 Persentase Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Mamuju(%),2023



Sumber Data Mamuju Dalam Angka ,2024

Tabel 1.1
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju ,
2023

Kecamatan <i>District</i>	Ibu kota Kecamatan <i>Capital of District</i>	Luas <i>Total Area</i> <i>(km²/sq.km)</i>
(1)	(2)	(3)
Tapalang	Galung	273,02
TapalangBarat	Dungkait	111,63
Mamuju	Binanga	247,48
Simboro	Rangas	132,73
KepulauanBalabalakang	PulauSalissingan	1,48
Kalukku	Kalukku	454,96
Papalang	Topore	201,92
Sampaga	Bunde	110,83
Tommo	Campaloga	769,66
Kalumpang	Kalumpang	1.801,71
Bonehau	Bonehau	874,47
KabupatenMamuju	Karema	4.979,89

LanjutanTabel 1.1

Kecamatan <i>District</i>	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota <i>Percentage to Regency/Municipal Area</i>	JumlahPulau <i>Number of Islands</i>
(1)	(4)	(5)
Tapalang	5,48	1
TapalangBarat	2,24	1
Mamuju	4,97	2
Simboro	2,67	1
KepulauanBalabalakang	0,03	14
Kalukku	9,14	1
Papalang	4,05	1
Sampaga	2,23	1
Tommo	15,46	1
Kalumpang	36,18	1
Bonehau	17,56	1
KabupatenMamuju	100,00	16

Sumber/Source: Data Estimasi Podes 2018 disesuaikan dengan edaran Kementerian Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tanggal 14 Februari 2022/Podes

2. Iklim

Curah Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh keadaan iklim. Oleh karena itu, curah hujan beragam menurut bulan. Selama 2023 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November sebanyak 330,0 mm.

Tabel 1.2
Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun BMKG Majene, 2023

Bulan Month	Suhu/Temperature($^{\circ}C$)		Kelembaban/Humidity(%)			
	Minimum Maksimum Average	Rata-rata Maximum	Maksimum Average	Minimum Maximum	Rata-rata	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Januari/January	...	28.20	...	51.00	73.30	97.00
Februari/February	...	28.00	...	59.00	74.70	96.00
Maret/March	...	29.00	...	59.00	73.10	98.00
April/April	...	30.50	...	56.00	70.60	99.00
Mei/May	...	31.30	...	55.00	69.20	98.00
Juni/June	...	30.00	...	55.00	72.50	99.00
Juli/July	...	29.00	...	58.00	72.70	94.00
Agustus/August	...	29.70	...	50.00	69.20	81.00
September/September	...	29.70	...	61.00	71.20	94.00
Oktober/October	...	30.30	...	58.00	69.40	90.00
November/November	...	29.70	...	61.00	73.60	91.00
Desember/December	...	29.10	...	66.00	78.50	99.00

Lanjutan Tabel 1.2

Bulan Month	Kecepatan Angin(knot) Wind Velocity(knot)			Tekanan Udara/Atmospheric Pressure(mbar)		
	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum	Minimum	Rata-rata Average	Maksimum Maximum
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Januari/January	1.00	4.40	11.00	1005.70	1009.60	1013.50
Februari/February	1.00	4.40	17.00	1006.30	1009.90	1012.80
Maret/March	1.00	4.30	13.00	1007.00	1010.70	1014.80
April/April	1.00	4.40	14.00	1005.70	1009.40	1013.20
Mei/May	1.00	4.60	9.00	1004.10	1010.20	1013.60
Juni/June	1.00	4.30	10.00	1007.30	1010.00	1012.60
Juli/July	1.00	4.30	10.00	1007.20	1010.30	1013.20
Agustus/August	1.00	5.10	11.00	1007.70	1011.00	1014.60
September/September	1.00	5.20	10.00	1007.30	1010.30	1012.70
Oktober/October	1.00	5.40	12.00	1008.20	1011.20	1013.90
November/November	1.00	4.80	10.00	1005.70	1009.90	1012.50
Desember/December	1.00	4.60	13.00	1006.50	1010.20	1013.70

Lanjutan Tabel 1.2

Bulan <i>Month</i>	JumlahCurahHujan (mm/tahun) <i>Numberof</i> <i>Precipitation</i> <i>(mm/year)</i>	JumlahHariHujan (hari) <i>NumberofRainy</i> <i>Days</i> <i>(day)</i>	PenyinaranMatahari (jam) <i>Durationof</i> <i>Sunshine(hour)</i>
(1)	(14)	(15)	(16)
Januari/January	105.30	15	6.6
Februari/February	193.80	16	4.5
Maret/March	309.90	21	4.3
April/April	93.30	16	3.6
Mei/May	183.10	12	5.7
Juni/June	65.10	22	6.9
Juli/July	153.70	12	7.1
Agustus/August	21.20	7	5.9
September/September	97.40	7	7.3
Oktober/October	56.20	10	8.8
November/November	330.00	21	7.7
Desember/December	248.50	19	8.7

Sumber/Source: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

3. Kependudukan

Data penduduk tahun 2023 yang disajikan pada bab ini adalah hasil proyeksi data sensus penduduk 2020. Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 adalah 292.395 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 105. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Mamuju di atas 100, memiliki arti jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Mamuju lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Semua kecamatan memiliki angka rasio jenis kelamin di atas 100.

Pada 2023, kepadatan penduduk Kabupaten Mamuju mencapai 59,0 jiwa per km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Kepulauan Balabalakang dengan kepadatan penduduk 1.516,0 jiwa per km².

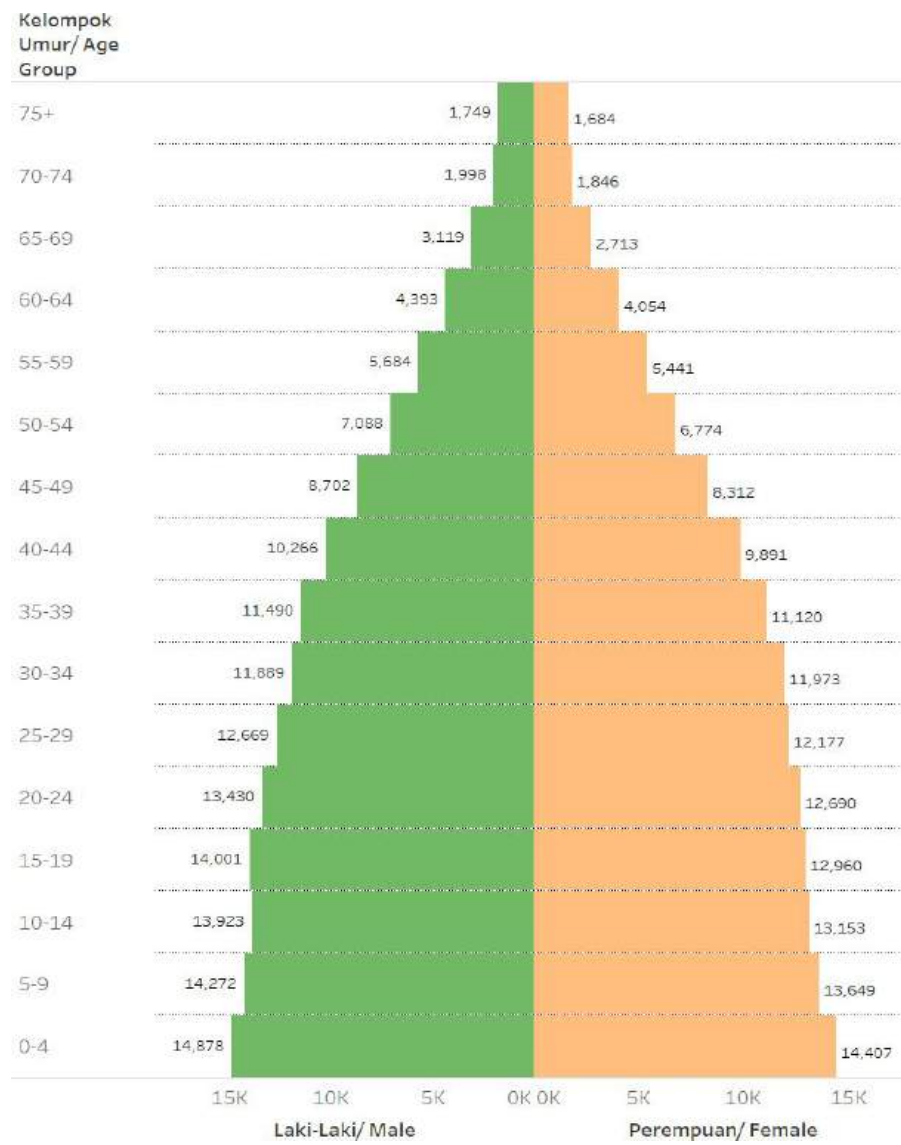
Tabel 1.3

Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Mamuju, 2023

Kecamatan <i>District</i>	Penduduk(ribu) <i>Population</i>	LajuPertumbuhanPendudukper Tahun2020-2023(%) <i>AnnualPopulationGrowthRate 2020-2023(%)</i>
(1)	(2)	(3)
Tapalang	21.624	1,39
TapalangBarat	11.793	1,33
Mamuju	67.575	1,60
Simboro	39.517	3,38
KepulauanBalabalakang	2.244	0,71
Kalukku	62.134	1,83
Papalang	24.662	1,08
Sampaga	16.487	1,27
Tommo	24.606	1,87
Kalumpang	12.022	0,80
Bonehau	9.731	0,91
KabupatenMamuju	292.395	1,75

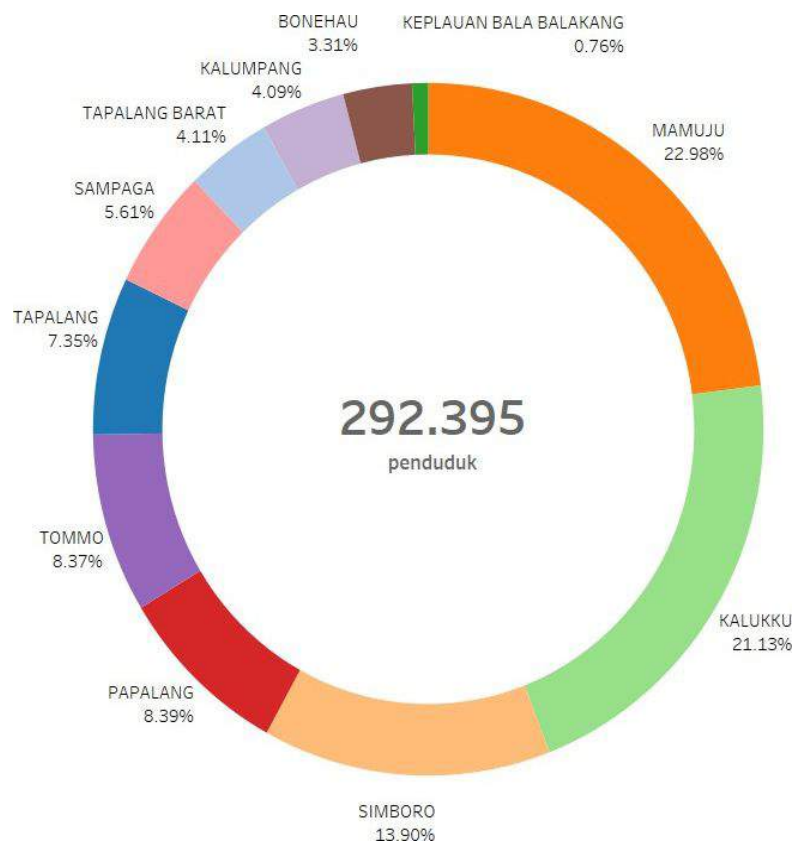
Kecamatan <i>District</i>	PersentasePenduduk <i>PercentageofTotal Population</i>	KepadatanPendudukperkm ² Po <i>ulationDensityper sq.km</i>
(1)	(4)	(5)
Tapalang	7,40	79
TapalangBarat	4,03	106
Mamuju	23,11	273
Simboro	13,51	298
KepulauanBalabalakang	0,77	1.516
Kalukku	21,25	137
Papalang	8,43	122
Sampaga	5,64	149
Tommo	8,42	32
Kalumpang	4,11	7
Bonehau	3,33	11
KabupatenMamuju	100,00	59

Gambar 1. 4
Piramida penduduk Kabupaten Mamuju Tahun 2023



Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Interim SP 2020,BPS

Gambar 1.5
 Persentase Penduduk PerKecamatan di Kabupaten Mamuju,2023



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik , Proyeksi Penduduk 2020-2035 hasil SP2020

4. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal bagi pembangunan suatu bangsa. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Pada tahun 2023 terdapat 208.749 penduduk usia kerja di Kabupaten Mamuju. Bagian yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Mamuju tahun 2023 sebesar 68,24 persen. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,99 persen. Jumlah angkatan kerja yang bekerja sekitar 138.194 orang.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju, 2023

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/ <i>Sex</i>		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Laki-Laki+ Perempuan <i>Male+Female</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/<i>Economically Active</i>	92.697	49.762	142.459
1. Bekerja/ <i>Working</i>	89.901	48.293	138.194
2. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	2.796	1.469	4.265
II. Bukan Angkatan Kerja/<i>Not Economically Active</i>	14.096	52.194	66.290
1. Sekolah/ <i>Attending School</i>	7.402	8.721	16.123
2. Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	3.753	41.001	44.754
3. Lainnya/ <i>Others</i>	2.941	2.472	5.413
Jumlah/Total	106.793	101.956	208.749

Tabel 1.5

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mamuju, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	61.444	928	62.372	98,51
1	17.636	633	18.269	96,54
2	38.625	2.316	40.941	94,34
3	20.489	388	20.877	98,14
Jumlah/Total	138.194	4.265	142.459	97,01

Lanjutan Tabel 1.5

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah Total	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <i>Labour Force Participation Rate (%)</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	23.633	86.005	29,43
1	19.091	37.360	8,45
2	18.677	59.618	18,50
3	4.889	25.766	9,82
Jumlah/Total	66.290	208.749	66,20

Catatan/Note: 0.≤Sekolah Dasar(SD)/≤Primary School

1.Sekolah Menengah Pertama/Junior High School

2.Sekolah Menengah Atas/Senior High School

3.Perguruan Tinggi

1.Mencari pekerjaan

2.Mempersiapkan usaha

3.Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan

4.Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Tabel 1.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Mamuju, 2023

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	19.324	7.693	27.017
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/ unpaid worker</i>	23.538	7.460	30.998
Berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/ paid worker</i>	4.312	952	5.264
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	28.453	14.447	42.900
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	5.292	459	5.751
Pekerja keluarga/ tak dibayar <i>Family worker/ unpaid worker</i>	8.982	17.282	26.264
Jumlah/Total	89.901	48.293	138.194

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

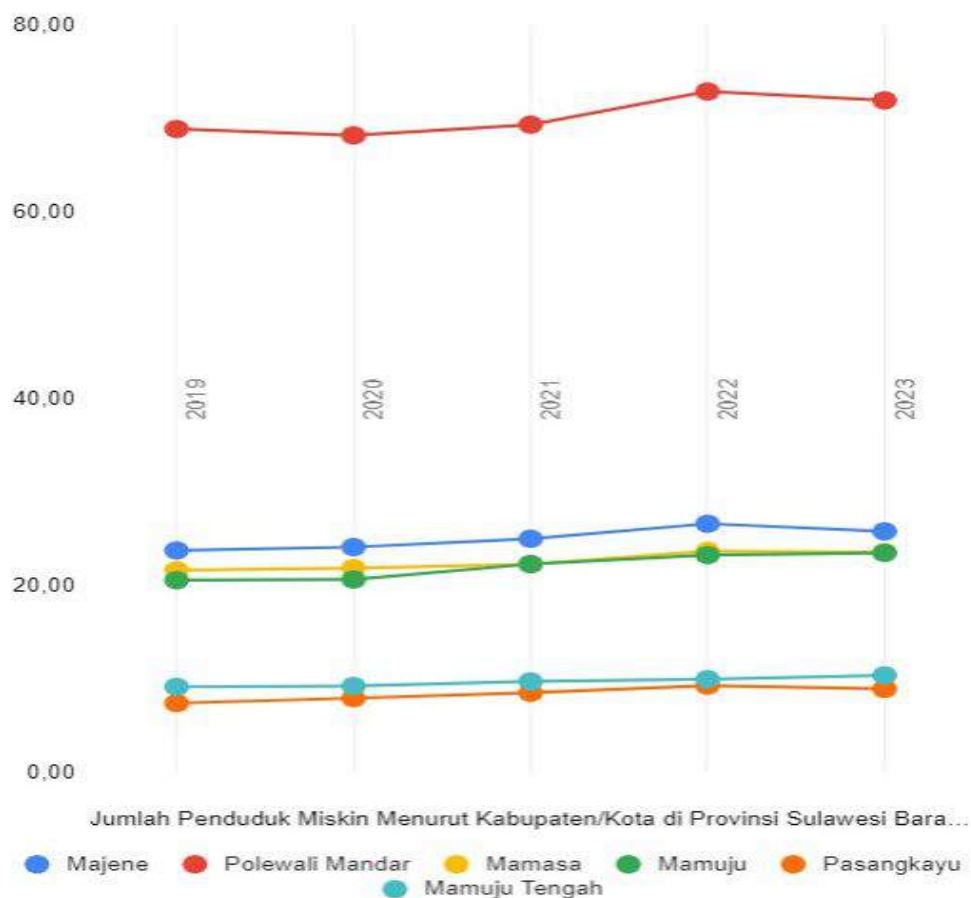
➤ **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Sulawesi Barat mengalami fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023, dengan beberapa tahun mengalami kontraksi dan beberapa tahun lainnya mengalami pertumbuhan positif. Meskipun demikian, secara keseluruhan, terdapat tren positif dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan yang cenderung meningkat selama periode tersebut. Pasangkayu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup variatif, termasuk tahun dengan pertumbuhan negatif yang signifikan pada tahun 2020, namun menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun 2023.

Dilihat dari data jumlah penduduk miskin, Kabupaten Mamuju masih cukup rendah dibandingkan kabupaten lain. Jumlah penduduk miskin kabupaten mamuju pada 2023 diperkirakan sebanyak 23,50 ribu atau tidak sampai setengah dari yang tertinggi di polewali mandar yang mencapai 71,92 ribu orang.

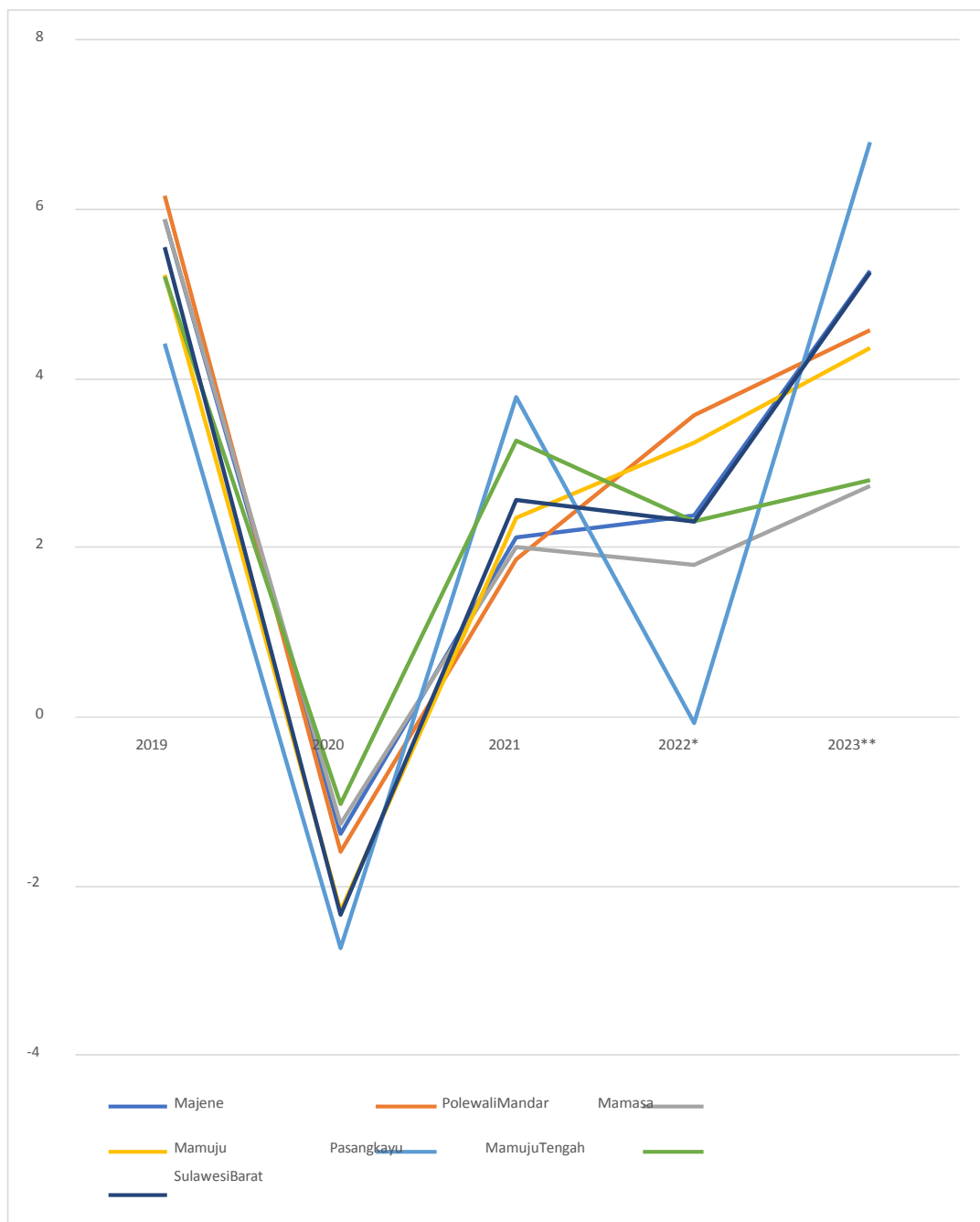
Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 71,07. Nilai IPM Kabupaten Mamuju berada di posisi kedua dari enam kabupaten di Sulawesi Barat.

Grafik 1.1
Gambaran Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten
di Provinsi Sulawesi Barat (%), 2023



Sumber/Source : Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Grafik 1.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi menurut
Kabupaten di Sulawesi Barat, 2019-2023



Sumber/Source : BPS, Berbagai survei dan Sensus

Tabel 1.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten di
Provinsi Sulawesi Barat (persen), 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	5,89	-1,38	2,13	2,39	5,28
PolewaliMandar	6,16	-1,58	1,87	3,58	4,58
Mamasa	5,87	-1,27	2,00	1,79	2,72
Mamuju	5,22	-2,29	2,35	3,24	4,37
Pasangkayu	4,40	-2,73	3,78	-0,08	6,78
MamujuTengah	5,21	-1,02	3,26	2,30	2,80
SulawesiBarat	5,56	-2,34	2,57	2,31	5,25

Catatan/Note: *Angka Sementara/Preliminary Figures
**Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten di Provinsi
Sulawesi Barat (ribu), 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Majene	23,76	24,12	25,01	26,62	25,80
PolewaliMandar	68,86	68,18	69,32	72,87	71,92
Mamasa	21,64	21,86	22,29	23,70	23,58
Mamuju	20,57	20,65	22,30	23,26	23,50
Pasangkayu	7,42	7,95	8,53	9,30	8,94
MamujuTengah	9,16	9,25	9,74	9,98	10,39
SulawesiBarat	151,4	152,01	157,19	165,72	164,14

Catatan/Note: Perkiraan Jumlah Penduduk Miskin per Maret 2022
Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

➤ Kondisi Pemerintahan

➤ Pegawai Negeri Sipil

Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mamuju mencapai 4.117 orang. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang 3.736 pegawai. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sekitar 53,7 persen PNS Kabupaten Mamuju adalah perempuan dan 46,3 persen laki-laki. Proporsi PNS Kabupaten Mamuju menurut jenjang pendidikan sebagai berikut 0,2 persen berpendidikan SD, 0,3 persen berpendidikan SLTP/Sederajat, 18,1 persen berpendidikan SMA/ Sederajat, 8,7 persen berpendidikan Diploma I-III, 72,7 persen berpendidikan sarjana ke atas. Komposisi ini terus berubah tingkat pendidikan PNS sarjana di Kabupaten Mamuju terus meningkat dari tahun ke tahun.

➤ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pada tahun 2023, komposisi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Mamuju berjumlah 30 orang, terdiri dari 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. (10 persen dari total anggota DPRD). Proporsi anggota DPRD menurut partai terbanyak adalah Partai Nasional Demokrat (NasDem), dengan 9 orang, dua di antaranya perempuan. Disusul Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan Partai Demokrat masing masing dengan 4 wakil.

Pada Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Mamuju mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju. Adapun Organisasi Perangkat Daerah Terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat
4. Dinas Daerah;
5. Badan Daerah; dan
6. Kecamatan.

Dengan uraian OPD berdasarkan Tipe sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud merupakan Perangkat Daerah Tipe A. terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) asisten.
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe B. terdiri atas 3 (tiga) bagian. Dan 3 (tiga) subbagian.
3. Inspektorat Daerah merupakan Perangkat Daerah Tipe A.

4. Dinas Daerah terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas Tipe A;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Tipe A;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Dinas Tipe A;
 - d. Dinas perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan merupakan Dinas Tipe B;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Tipe A;
 - f. Dinas Sosial merupakan Dinas Tipe B;
 - g. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja merupakan Dinas Tipe A;
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Dinas Tipe B;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan merupakan Dinas Tipe B;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan Dinas Tipe B;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Tipe A;
 - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan Dinas Tipe B;
 - m. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Tipe B;
 - n. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Tipe B;
 - o. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian merupakan Dinas Tipe A;
 - p. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perindustrian merupakan Dinas Tipe B;
 - q. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Tipe A;
 - r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Tipe B;
 - s. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Tipe A;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan Dinas Tipe A;
 - u. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan merupakan Dinas Tipe B;
 - v. Dinas Perkebunan merupakan Dinas Tipe B;
 - w. Dinas Perdagangan merupakan Dinas Tipe B;
5. Badan Daerah terdiri atas:
 - a. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan Badan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan Badan Daerah Tipe A;
 - c. Badan Pendapatan Daerah merupakan Badan Daerah Tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan Badan Daerah Tipe B;

6. Kecamatan terdiri atas :
- a. Kecamatan Tapalang Barat merupakan kecamatan Tipe A;
 - b. Kecamatan Mamuju merupakan kecamatan Tipe A;
 - c. Kecamatan Simboro merupakan kecamatan Tipe A;
 - d. Kecamatan Tapalang merupakan kecamatan Tipe A;
 - e. Kecamatan Kepulauan Balabalakang merupakan kecamatan Tipe A;
 - f. Kecamatan Kalukku merupakan kecamatan Tipe A;
 - g. Kecamatan Papalang merupakan kecamatan Tipe A;
 - h. Kecamatan Sampaga merupakan kecamatan Tipe A;
 - i. Kecamatan Tommo merupakan kecamatan Tipe A;
 - j. Kecamatan Kalumpang merupakan kecamatan Tipe A;
 - k. Kecamatan Bonehau merupakan kecamatan Tipe A.

Tabel1.8
Daftar OPD Kabupaten Mamuju tahun 2023

No	Organisasi Perangkat Daerah
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6	Dinas Sosial
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
9	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perkebunan
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
13	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
14	Dinas Perhubungan

15	Dinas Koperasi, UsahaKecil, Menengah dan Perindustrian
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Perdagangan
19	Dinas Ketahanan Pangan
20	Dinas Kelautan dan Perikanan
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
22	Dinas Kesehatan
23	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
24	Inspektorat
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
27	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
28	Badan Pendapatan Daerah
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
31	Sekretariat DPRD
32	Sekretariat Daerah
33	Rumah Sakit Umum Daerah
34	Bagian Administrasi Pembangunan
35	Bagian Kesejahteraan Rakyat
36	Bagian Perencanaan dan Keuangan
37	Bagian Organisasi
39	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
40	Bagian Tata Pemerintahan
41	Bagian Umum

42	Bagian Kerjasama
43	Bagian Sumber daya Alam
44	Bagian Perekonomian
45	Bagian Hukum
46	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
47	Kecamatan Mamuju
48	Kecamatan Simboro
49	Kecamatan Tapalang
50	Kecamatan Tapalang Barat
51	Kecamatan Kalukku
52	Kecamatan Kalukku
53	Kecamatan Sampaga
54	Kecamatan Tommo
55	Kecamatan Bonehau
56	Kecamatan Kalumpang
57	Kecamatan Bala-Balakang

Dalam Struktur Organisasi Perangkat Daerah menangani beberapa Urusan Pemerintahan berdasarkan Tugas dan fungsi OPD tersebut, adapun Urusan - urusan yang dilaksanakan dipaparkan dalam table sebagai berikut :

Tabel1.9
Urusan Pemerintahan

URUSAN	KETERANGAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	DINAS KESEHATAN
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	DINAS SOSIAL
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	DINA STRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	DINAS KETAHANAN PANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	DINAS PERHUBUNGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

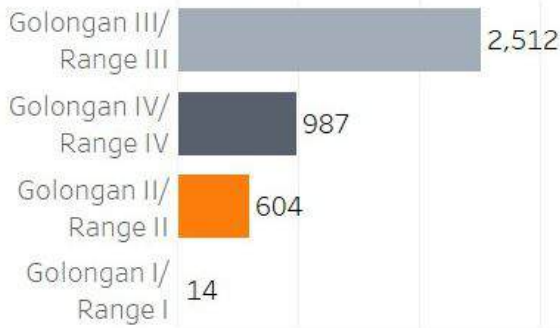
URUSANPEMERINTAHANBIDANGKEBUDAYAAN	DINASPARIWISATADAN KEBUDAYAAN
------------------------------------	----------------------------------

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	DINAS PERDAGANGAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	
FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH
FUNGSI SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIAT DPRD
UNSUR PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN	
FUNGSI PERENCANAAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
FUNGSI KEUANGAN	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
FUNGSI KEPEGAWAIAN	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
FUNGSI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	
INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTORAT DAERAH
UNSUR KEWILAYAHAN	
KECAMATAN	SEMUA KECAMATAN
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

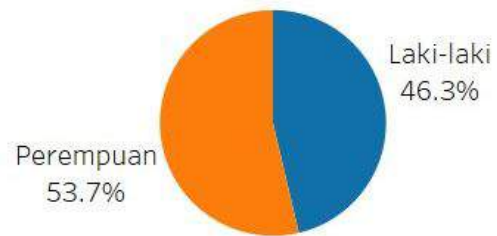
Grafik 1.4
Komposisi Aparatur Sipil Negara Menurut Jenis Kelamin, Tingkat Golongan dan Jenjang Jabatan di Kabupaten Mamuju, 2023



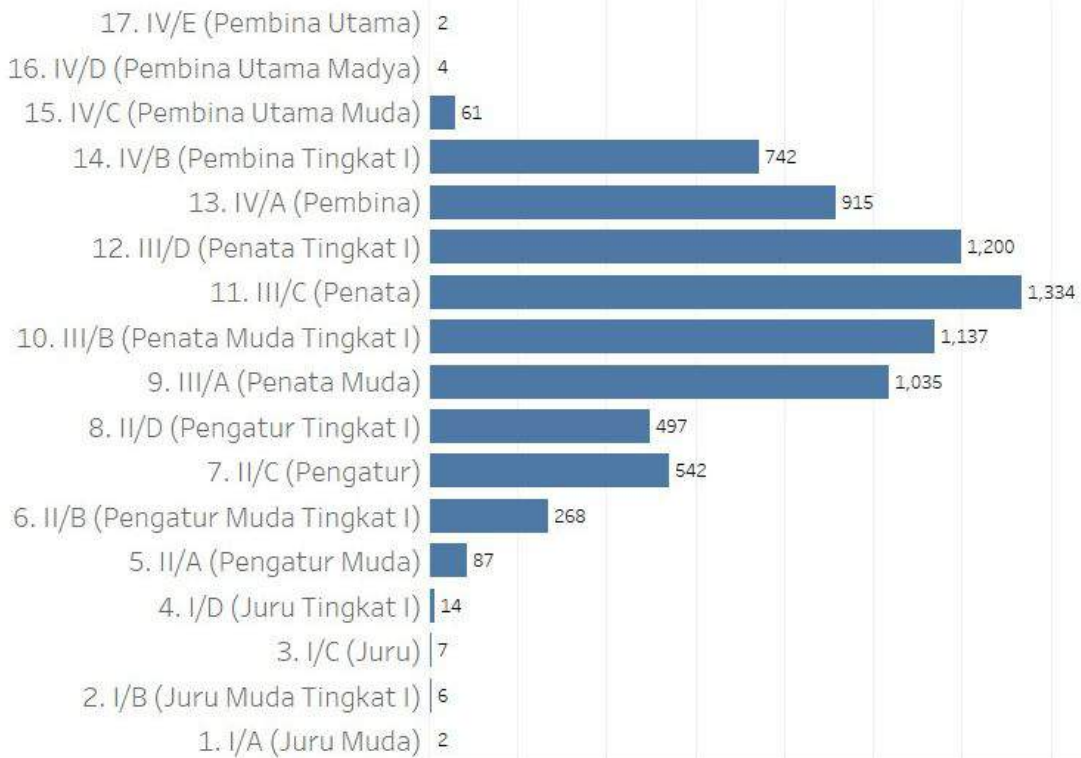
ASN Berdasarkan Golongan



% ASN Berdasarkan Jenis Kelamin



ASN Berdasarkan Jabatan



Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin, di Kabupaten Mamuju,
Desember 2022 dan Desember 2023

Jabatan Occupation	2022		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	28	7	35
Administrator/Administrator	115	52	167
Pengawas/Supervisor	154	114	268
Eselon V / 5 th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	586	922	1.508
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	79	495	574
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	229	205	434
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana General Functional Position	685	653	1.338
Jumlah / Total	1.876	2.448	4.324

lanjutan tabel 1.10

Jabatan Occupation	2023		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama Senior Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Middle Executives	-	-	-
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Junior Executives	29	7	36
Administrator/Administrator	120	54	174
Pengawas/Supervisor	149	121	270
Eselon V / 5 th Echelon	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen Certain Functional Position for Lecturer	-	-	-
Jabatan Fungsional Guru Certain Functional Position for Teacher	536	871	1.407
Jabatan Fungsional Medis Certain Functional Position for Medical Field	101	528	629
Jabatan Fungsional Teknis Certain Functional Position for Technical Field	245	237	482
Jabatan Fungsional Umum / Pelaksana General Functional Position	583	536	1.119
Jumlah / Total	1.763	2.354	4.117

Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Badan Kepegawaian Negara (BKN)/National Civil Service Agency

Tabel 1.11
Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mamuju,
Desember 2022 dan Desember 2023

Pangkat/Golongan/Ruang <i>Hierarchy</i>	2022		
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Golongan I/Rang I			
1.I/A (Juru Muda/Junior Clerk)	1	0	1
2.I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	3	0	3
3.I/C (Juru/Clerk)	3	0	3
4.I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)	7	1	8
Golongan II/Rang II			
5.II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)	25	6	31
6.II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	66	38	104
7.II/C (Pengatur/Supervisor)	129	134	263
8.II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	191	207	398
Golongan III/Rang III			
9.III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)	180	299	479
10.III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	236	364	600
11.III/C (Penata/Superintendent)	225	362	587
12.III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	344	483	827
Golongan IV/Rang IV			
13.IV/A (Pembina/Administrator)	201	283	484
14.IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	242	256	498
15.IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	20	15	53
16.IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	2	0	2
17.IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)	1	0	1
Jumlah/Total	1.876	2.448	4.324

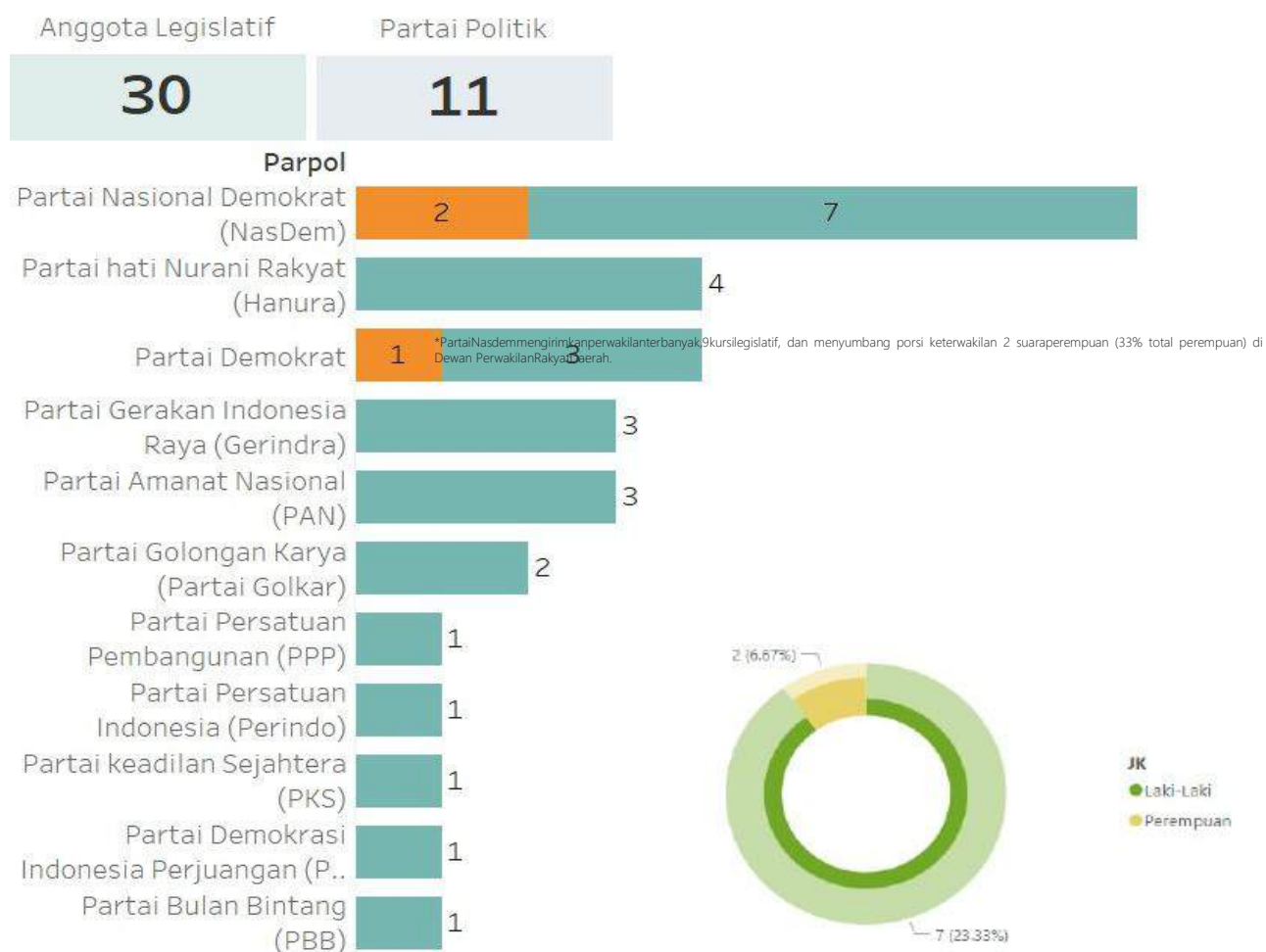
Lanjutan Tabel 1.11

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	2023			
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Golongan I/Rang I				
1.I/A (Juru Muda/Junior Clerk)		1	0	1
2.I/B (Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)		3	0	3
3.I/C (Juru/Clerk)		3	0	3
4.I/D (Juru Tingkat I/First Class Clerk)		6	1	7
Golongan II/Rang II				
5.II/A (Pengatur Muda/Junior Supervisor)		20	4	24
6.II/B (Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)		45	23	68
7.II/C (Pengatur/Supervisor)		122	84	206
8.II/D (Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)		138	168	306
Golongan III/Rang III				
9.III/A (Penata Muda/Junior Superintendent)		185	306	491
10.III/B (Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)		213	326	539
11.III/C (Penata/Superintendent)		244	382	626
12.III/D (Penata Tingkat I/First Class Superintendent)		349	507	856
Golongan IV/Rang IV				
13.IV/A (Pembina/Administrator)		186	272	458
14.IV/B (Pembina Tingkat I/First Class Administrator)		226	259	485
15.IV/C (Pembina Utama Muda/Junior Administrator)		19	22	41
16.IV/D (Pembina Utama Madya/Middle Administrator)		2	0	2
17.IV/E (Pembina Utama/Senior Administrator)		1	0	1
Jumlah/Total		1.763	2.354	4.117

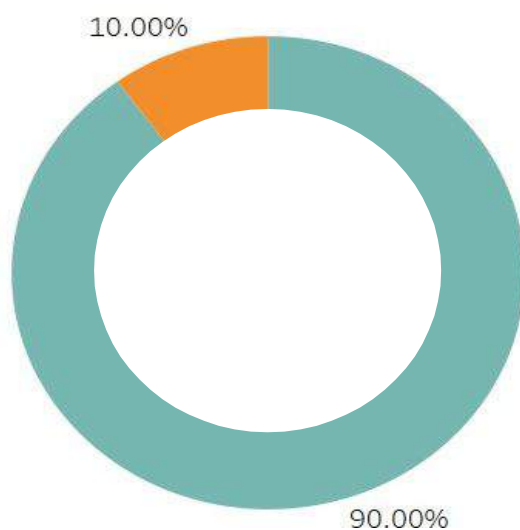
Catatan/Note: ...

Sumber/Source: Badan Kepegawaian Negara (BKN)/National Civil Service Agency

Grafik 1.5
Komposisi Anggota Perwakilan Rakyat menurut Partai
dan jenis kelamin di Kabupaten Mamuju, 2023



Jenis Kelamin
■ Perempuan
■ Laki-Laki



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mamuju memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Mamuju tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2021 – 2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu – isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

1) Visi

Visi adalah suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud di masa mendatang. Visi pembangunan untuk periode 2021-2025 sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka pembangunan jangka Panjang Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri pada tahun 2025.

Tantangan tahapan periode ini sangat berat untuk memenuhi target RPJPD 2025 setelah Kabupaten Mamuju terdampak covid 19 dan gempa bumi yang melumpuhkan hampir semua sendi kehidupan. Sangat diperlukan Visi yang kuat, kreatifitas dan inovasi yang tinggi agar harapan untuk mencapai Mamuju yang maju dan Mandiri dapat dicapai. Kenyataan tersebut menjadi latar belakang penting lima tahun ke depan untuk memberikan focus dan perhatian pada peletakan Kembali sendi-sendi pembangunan yang berorientasi pada hasil (out come) dengan memanfaatkan semua kekuatan berupa potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, peluang letak geografi dan demografi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut Tema Visi “Terwujudnya Masyarakat Mamuju yang Maju dan Mandiri” dapat di rumuskan bahwa Mamuju Maju dan Mandiri menjadi arah pembangunan Kabupaten Mamuju dalam lima tahun ke depan dengan Visi :

MAMUJU KEREN
(Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif,
Edukatif, Ramah, Energik dan Nyaman)

2) Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021- 2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Visi Mamuju “KEREN” (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan
3. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.
4. Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.
5. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026 memperhatikan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Mamuju tahun 2005-2025, tujuan dan sasaran RPJMN, dan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022.

Penjabaran tujuan dan sasaran Kabupaten Mamuju Tahun 2021- 2026 yang akan dicapai pada masing-masing misi tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel II.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
								2022	2023	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih		1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A
			Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	a.	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
				b.	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
				c.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80	90	90	90	90	90

2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90
			Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	a.	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	50	60	70	80	90
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	b.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	77,14	77,41	77,68	77,95	78,22	78,49
				c.	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang
3	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia		1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,15%	68,35%	68,50%	68,70%	68,85%	69,05%
			Meningkatn	a.	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55

	Sosial.		ya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	b.	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632
				c.	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah / Orang / Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000
				d.	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55
				e.	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	60	65	70	75
4	Mewujudkan daerah yang beradab dengan mengedepankan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal	Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara		1	Indeks ketentraman ketertiban	Persen	N/A	100	100	100	100	100

			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	a.	Indeks Kriminilitas	Persen	N/A	100	100	100	100	100
5	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi		1	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19
			Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	a.	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%
			Meningkatnya investasi daerah	b.	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	15	15	15	15
		Mengentaskan Kemiskinan		2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	5,5	5	4,5	4

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan/Sasaran		Satuan	Kondisi Awal 2020/2021	Target Kinerja				
								2022	2023	2024	2025	2026
			Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00
			Meningkatnya kemandirian desa	b.	Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berkembang)	0,624 (Berkembang)	0,645 (Berkembang)	0,687 (Berkembang)	0,700 (Berkembang)	0,707 (Maju)

4) Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

a. Strategi

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pada masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan. Strategi akan diturunkan kedalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 disusun dengan memperhatikan strategi pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan strategi pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022. Strategi pembangunan jangka menengah daerah RPJMD Kabupaten Mamuju tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 2
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Mamuju
Tahun 2021-2026

No	Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Strategi RPJMD
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Meningkatnya kinerja Keuangan dan Pengawasan	Pembentukan SDM yang tangguh melalui pelayanan penataan aparatur, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan pembinaan kesejahteraan dan informasi pegawai
				Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Investasi melalui perbaikan proses dan pelayanan perijinan dengan menerapkan system aplikasi berbasis online
				Peningkatan manajemen pemerintahan yang akuntabel melalui, pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, secara terpadu; peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern (SPIP) secara baik, perkuat kemampuan APIP
			Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan implementasi single data dan pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi melalui Kartu Mamuju Keren
				Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat, membangun keterbukaan pemerintahan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, partisipasi publik dalam meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
2	Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang berkelanjutan	Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah	Pengurangan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur; pendampingan sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh; dan pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru
				Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan peningkatan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan
				Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, penataan bangunan gedung, sanitasi dan air bersih serta pengelolaan sumber daya air melalui pembangunan dan rehabilitasi, serta pengalihan status jalan

		Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan		<p>Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum dan penyediaan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan</p> <p>Peningkatan akses informasi tata ruang dan cegah dini pelanggaran tata ruang melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan</p>
			Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pemantauan kualitas air, tutupan lahan dan udara
				<p>Meningkatkan pengelolaan persampahan dengan memperluas area pelayanan persampahan, pengolahan sampah di TPA serta pengurangan sampah (3R) melalui Bank Sampah</p> <p>Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana melalui pelayanan informasi kebencanaan, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta penataan sistem dasar penanggulangan bencana</p>
3	Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.	Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	<p>a. Meningkatkan partisipasi pendidikan dalam rangka pemenuhan SPM, dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui: pengembangan pendidikan karakter dan peningkatan ekosistem Pendidikan;</p> <p>b. peningkatan motivasi belajar dan pemberian bantuan bagi peserta didik agar tidak putus sekolah;</p> <p>c. pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah, pengadaan buku ajar, dan pengembangan kapasitas sekolah;</p> <p>d. peningkatan kualifikasi dan pemerataan guru sesuai dengan kebutuhan</p> <p>e. Meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang SD dan SMP melalui Gerakan Kembali Bersekolah</p>

			Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas, penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan perbaikan status gizi masyarakat
			Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk melalui intensifikasi program Keluarga Berencana
			Adanya Regulasi atau kebijakan terkait permasalahan ketimpangan gender
			Membudayakan berolahraga agar dapat hidup sehat dan meningkatkan prestasi olahraga melalui pembibitan atlet peningkatan kompetensi atlet berbakat, pelatih dan wasit melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan kualitas sarana prasarana olahraga.
			Meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan pemuda pelopor dan wirausaha muda, dan pembinaan Pramuka.
			Meningkatkan kualitas konsumsi pangan melalui penyediaan pangan yang cukup baik sisi jumlah, mutu maupun keamanannya dengan harga yang terjangkau.
			Meningkatkan kualitas hidup dan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dan perlindungan perempuan, serta pemenuhan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak dan perlindungan khusus anak
			Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tertangani melalui rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar, serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

4	Mewujudkan daerah yang beradab dengan mendapatkan pendekatan Agama, Budaya serta Kearifan Lokal.	Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragamayang kondusif dan terpelihara	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Peningkatan kondusifitas daerah melalui pembinaan politik dan wawasan kebangsaan untukmengantisipasi potensi konflik sosial di masyarakat.
				Meningkatkan pengendalian atas gangguan keamanan dan Ketertiban umum melalui penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Perda maupun Perkada, dan pembinaan PPNS.
5	Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis inovasi dan potensi Lokal	Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, modernisasi pertanian, serta penanganan bencana pertanian
				Meningkatkan pengembangan ternak melalui penyediaan sarana dan prasarana peternakan, dan pemanfaatan teknologi peternakan, serta peningkatan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner
				Meningkatkan produktivitas perikanan melalui pembinaan penerapan cara budidaya ikan yang baik, dan penyediaan sarana produksi perikanan
				Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan dalam negeri melalui peningkatan kualitas pasar, pengawasan perdagangan, dan pemasaran produk unggulan daerah.
				Meningkatkan penataan kawasan industri dan pengembangan industri sesuai dengan potensidaerah
				Memfokuskan penyelesaian administrasi persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Mamuju
				Meningkatkan kunjungan wisata melalui penyelenggaraan event, keberagaman atraksi sertapeningkatan destinasi wisata baru
				Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, kesenian tradisional, sejarah serta cagar budaya daerah melalui pengembangan seni dan budaya dan

			pembangunan museum.
		Meningkatnya investasi daerah	Membuka peluang investasi berbasis potensi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi serta pemasaran investasi
	Pengentasan Kemiskinan	Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Mengurangi pengangguran melalui pembekalan ketrampilan yang memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
		Meningkatnya kemandirian desa	Meningkatkan kemandirian melalui pengembangan BUMDes, pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, dan peningkatan kualitas pelayanan publik pemerintah desa

B. Arah Kebijakan Tahunan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Mamuju, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Tabel II.3
Arah Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan				
Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
KEREN I Penguatan birokrasi penopang utama pemulihan ekonomi	KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan	KEREN III Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan	KEREN IV Menguatkan Pembangunan Manusia dan Kemandirian Ekonomi di Seluruh Wilayah yang Terintegrasi dan Berkelanjutan	Mamuju KEREN (Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, Nyaman) Menstabilisasi Kemandirian Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan disertai dengan Penurunan Kesenjangan Kabupaten Mamuju

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut.

1) Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: “KEREN II Akselerasi Pertumbuhan dan Pemerataan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Peningkatan produktivitas pada pusat pertumbuhan ekonomi baru

melalui investasi berbasis potensi daerah

- b. Peningkatan kondusifitas wilayah dan harmoni sosial masyarakat
- c. Pengembangan potensi sumberdaya ekonomi dan investasi daerah
- d. Peningkatan ekonomi kerakyatan menuju kesejahteraan masyarakat
- e. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima (profesional, progresif, bersih dan akuntabel).

C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Mamuju dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (impact) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju sebagaimana tertuang pada Tabel berikut :

Tabel II.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020/2021	Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
					Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$	%	68,15	68,35	68,50	68,70	68,85	69,05	69,05
2	Indeks Pendidikan	$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$ $I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$ $I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Skala	0,26	0,30	0,36	0,42	0,50	0,55	0,55
3	Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Skala	0,508	0,522	0,556	0,578	0,612	0,632	0,632
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	9.500	12.000	24.000	32.500	44.000	52.000	52.000

5	Indeks Pemberdayaan Gender	$IDG = \frac{I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-des)}}{3}$	%	58,96	59,12	59,58	59,87	60,12	60,55	60,55
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% Persentase PSKS yang aktif	%	50	55	60	65	70	75	75
	Indeks Pembangunan Infrastruktur	[40%{50% (50% kualitas sarpras jalan& jembatan + 50% kualitas PJU) } + {40% (50% kualitas saluran pengairan + 50% drainase kondisi baik)} + (10% Pemenuhan bangunansesuai standar)] + [20%{50% pengurangansampah + 50% pengangkutan sampah }]+30%Level of Service + [10% ({50% kampung tangguh bencana + 30% evakuasi korban bencana + 20% rehabilitasi dan rekonstruksi} +{30% ketepatan waktu	%	N/A	50	60	70	80	90	90

		rekomendasi proteksi kebakaran+30% edukasi proteksi kebakaran+40 % response time })/2]								
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Survey kepuasan layanan infrastruktur : 1. Ketersediaan Fisik (<i>availability</i>) 2. Kualitas Fisik (<i>quality</i>) 3. Kesesuaian (<i>Appropriateness</i>) 4. Efektifitas Pemanfaatan (<i>Utility</i>) 5. Penyerapan Tenaga Kerja (<i>Job Creation</i>) 6. Kontribusi pada Perekonomian	%	N/A	50	60	70	80	90	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	30%IKU + 30% IKA + 40% ITV	%	N/A	80	80	80	80,5	80,6	80,6
	Indeks Resiko	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$	Predik	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Sedan	Sedan	Sedan	Seda

	Bencana		at				g	g	g	ng
	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah kasus tertangani tahun n-1 dibagi jumlah kasus tahun ndikali 100	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Kriminilitas	$I_t = \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun } t_0} \times 100$	%	N/A	100	100	100	100	100	100
	Indeks Gini	$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} (F_{Ci-1} + Y_{Ci})$	%	0,36	0,32	0,28	0,25	0,20	0,19	0,19
	Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1, t) = (PDBt - PDBt-1)/PDBt-1 \times 100\%$	%	-2,08	5.0-5.5%	5.5-5.6%	5.6-5.7%	5.7-5.8%	5.8-6.0%	5.8-6.0%
	Pertumbuhan Investasi	$CAGR = \left(\frac{\text{Ending Value}}{\text{Beginning Value}} \right)^{\left(\frac{1}{\# \text{ of years}} \right)} - 1$	%	15	15	15	15	15	15	15
	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	7,4	6	5,5	5	4,5	4	4
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{\text{jumlah pengangguran}}{\text{jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$	%	2,89	2,75	2,49	2,27	2,05	2,00	2,00
	Indeks Desa Membran gun	$IDM = 1/3 (IS + IEK + IL)$	Skala	0,683	0,690	0,695	0,698	0,700	0,707	0,707
	Indeks Reformasi	Skor hasil evaluasi mandiri reformasi	Predikat	C	CC	B	B	BB	A	A

	Birokrasi	birokrasi									
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran + pengalokasian anggaran belanja dalam APBD + Transparansi pengelolaan keuangan + Penyerapan anggaran + Kondisi keuangan daerah + Opini BPK	Predikat	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK
	Nilai LPPD	Hasil Penilaian LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Skor	80	90	90	90	90	90	90	90

b. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Perjanjian kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, disebutkan bahwa Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

1) Tujuan Perjanjian Kinerja

Tujuan Perjanjian kinerja, terbagi atas tujuan umum dan khusus. Tujuan umum diantaranya meliputi :

- a) Intensifikasi pencegahan korupsi
- b) Peningkatan kualitas pelayanan publik
- c) Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

- a) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah (mandat);
- c) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi;

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

SASARAN 1		
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik
Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi
SASARAN 2		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90
SASARAN 3		
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	60
Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	60
SASARAN 4		
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	77,68
Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi
SASARAN 5		
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,50
Indeks Pendidikan	Skala	0,36
Indeks Kesehatan	Skala	0,556
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	24.000

Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,58
Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	60
SASARAN 6		
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
Indeks Kriminilitas	Persen	100
SASARAN 7		
Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Gini	Persen	0,28
Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.5-5.6%
SASARAN 8		
Meningkatnya investasi daerah		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Pertumbuhan Investasi	Persen	15
SASARAN 9		
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,49
SASARAN 10		
Meningkatnya kemandirian desa		
INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
Indeks Desa Membangun	Skala	0,645 (Berkembang)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi\ Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mamuju tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsiperencanaan yang dilaksanakan. Dari Perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban publik.

A. Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Mamuju selaku pengemban amanah masyarakat Mamuju melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Mamuju.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2022-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Mamuju. Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program / kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Tabel III - 1
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

SKALA CAPAIAN KINERJA KATEGORI		
1	Lebih dari 100	Sangat Baik
2	75 – 100	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 6 (Enam) Tujuan dan 10 (sepuluh) sasaran, dengan 16 (enam belas) indikator sasaran. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 3 indikator kinerja, Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja, Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 1 indikator kinerja dan Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 4 indikator kinerja.

Mengacu pada Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021–2026, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

1. Misi I terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
2. Misi II terdapat 1 tujuan, 2 sasaran dan 4 indikator kinerja;
3. Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 6 indikator kinerja;
4. Misi IV terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 2 indikator kinerja;
5. Misi V terdapat 2 tujuan, 4 sasaran dan 6 indikator kinerja.

Tabel III - 2
Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	MISI	JUMLAH TUJUAN	JUMLAH SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN
1	Misi1	1	2	4	BS=0, B=2, C=1, K=1
2	Misi2	1	2	4	BS=2, B=2, C=0, K=0
3	Misi3	1	1	6	BS=4, B=1, C=0, K=1
4	Misi4	1	1	2	BS=0, B=2, C=0, K=0
5	Misi5	2	4	6	BS=1, B=4, C=1, K=0
	JUMLAH	6	10	22	BS=7, B=11, C=2, K=2

Dari 10 (Sepuluh) sasaran dengan 22 (Dua Puluh Dua) indikator kinerja, pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah:

Tabel III - 3
Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
Misi I (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	2	50
3	Cukup	1	25
4	Kurang	1	25
	Jumlah	4	100
Misi II (4 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	2	50
2	Baik	2	50
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	4	100
Misi III (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	4	66,7

No.	Kategori	Jumlah Indikator Sasaran	Persentase
2	Baik	1	16,7
3	Cukup	0	0
4	Kurang	1	16,7
	Jumlah	6	100
Misi IV (2 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	0	0
2	Baik	2	100
3	Cukup	0	0
4	Kurang	0	0
	Jumlah	2	100
Misi V (6 Indikator Sasaran)			
1	Baik Sekali	1	16,7
2	Baik	4	66, 8
3	Cukup	1	16,7
4	Kurang	0	0
	Jumlah	6	100

Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 7 indikator sasaran atau 31,81 persen bermakna Baik Sekali, 11 indikator sasaran atau 50,00 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup dan 2 indikator sasaran atau 9,09 persen Bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen. yang dimana hal tersebut tercipta disebabkan adanya salah satu Indikator yang mencapai jauh melebihi daripada target daerah yakni terdapat pada Indikator sasaran Pertumbuhan Investasi dengan capaian sebesar 455,00 Persen.

B. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai diatas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel III - 4
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	cc	cc	100
2	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	Baik	100
3	Nilai LPPD	Skor	Sangat Rendah	Sangat Tinggi	Rendah	50
Rata-rata capaian						75

Berdasarkan hasil evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Ditahun 2023 untuk Indikator Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Mamuju adalah 54,21 dengan realisasi Predikat cc dari target cc atau dapat disimpulkan capaian Kinerja 100. dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

No	Penilaian	Bobot	Nilai
1	RB General	100	50,89
2	RB Tematik	20	3,32
3	Indeks RB	120	54,21
			CC

Hasil Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mamuju telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada komponen pengungkit dan komponen hasil.

Pada Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kinerja keuangan dan pengawasan untuk Indikator Indeks Pengelolaan keuangan Daerah diperoleh Predikat Baik dari target Baik aatau dengan kata lain capaian Kinerja 100 %.

Adapun uraian dari Indeks Pengelolaan keuangan Daerah adalah Salah satu yang

diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yakni terkait dengan alat ukur yang digunakan. Dalam regulasi itu menjelaskan, ada enam dimensi yang digunakan sebagai alat ukur adapun uraian dari Enam dimensi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesesuaian dokumen perencanaan penganggaran

Dokumen perencanaan tahun 2023 sampai dengan penganggaran telah sesuai , karena dalam penyusunan RKPD sampai dengan APBD menggunakan satu aplikasi yaitu SIPD.

2. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD.

Dalam penyusunan APBD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mamuju mengutamakan pemenuhan belanja yang bersifat *mandatory* (belanja wajib) dimana penyediaan alokasi belanja fungsi Pendidikan sebesar 30,91% dari total APBD, urusan kesehatan sebesar 20,09% dari total APBD setelah dikurangi belanja gaji pokok ASN dan belanja untuk infrastruktur sebesar 32,89% dari total APBD setelah dikurangi belanja transfer sementara untuk alokasi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal hanya sebesar 4,07% dari total APBD.

3. Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju umumnya telah ditetapkan tepat waktu namun untuk dapat diakses dan diunduh secara umum dan terbuka belum semuanya dapat diunggah.

4. Penyerapan anggaran

Penyerapan anggaran dari belanja operasional sebesar 92,38% dan belanja transfer sebesar 98,75% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun 2023 dan untuk belanja modal sebesar 86,12% hal ini disebabkan terdapat beberapa belanja modal yang dianggarkan melalui APBD Perubahan Tahun 2023 sehingga waktu penyelesaian pekerjaan melampaui tahun berjalan yang berimplikasi pada rendahnya serapan anggaran. Sementara untuk belanja tidak terduga hanya mencapai 8,25% hal ini disebabkan karena belanja tidak terduga hanya dapat digunakan apabila ada kondisi tanggap darurat bencana dan keperluan mendesak.

5. Kondisi Keuangan Daerah

Kondisi Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu dan kemampuan untuk mempertahankan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju dapat digambarkan dalam indikator Kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka Panjang dan solvabilitas layanan. Dari perhitungan sesuai formula sebagaimana yang tercantum dalam table maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Kemandirian Keuangan

Kemandirian keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah tidak rentan terhadap sumber pendanaan di luar kendalinya atau pengaruhnya, baik dari sumber -sumber dalam negeri maupun luar negeri.

Pendapatan asli pemerintah daerah merupakan semua pendapatan yang bersumber dari daerah dan di bawah kendali pemerintah daerah. Ketika rasionya semakin rendah maka hal ini menunjukkan kurangnya kemandirian keuangan pemerintah daerah. Demikian pula sebaliknya, semakin tinggi nilai rasio, maka semakin tinggi kemandirian keuangan pemerintah daerah itu

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju tingkat kemandirian keuangan masih sangat rendah berada pada rasio 0,0846 sesuai hasil perhitungan formula Total PAD dibandingkan dengan total pendapatan yang artinya Pemerintah Kabupaten Mamuju masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Provinsi.

b. Fleksibilitas Keuangan

Fleksibilitas keuangan adalah suatu kondisi pemerintah daerah dapat meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen baik peningkatan pendapatan maupun peningkatan kapasitas utang.

Tingkat fleksibilitas keuangan pemerintah daerah yang tinggi dalam menghadapi kejadian luar biasa yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah daerah ditunjukkan dengan rasio yang semakin tinggi. Rasio ini diukur dengan membandingkan antara Total Pendapatan dikurangi Pendapatan DAK dengan Total Kewajiban ditambah belanja pegawai.

Pada pemerintah Kabupaten Mamuju fleksibilitas keuangan berada pada rasio 2,2077 artinya tingkat fleksibilitas Pemerintah Kabupaten Mamuju sebesar 2,2077 kali dalam menghadapi kejadian luar biasa yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintahan.

c. Solvabilitas Operasional

Solvabilitas operasional adalah kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

Indikator ini harus menunjukkan keseimbangan antara pendapatan normal pemerintah daerah dan pengeluaran operasional selama satu periode.

Rasio Solvabilitas operasional diukur dengan membandingkan antara Total Pendapatan LO dikurangi Pendapatan DAK LO dengan Total Beban LO. Semakin rendah nilai rasio yang dihasilkan menunjukkan semakin banyak pendapatan pemerintah daerah yang tersedia untuk membiayai belanja pemerintah daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju menunjukkan rasio solvabilitas operasional sebesar 0,8643 yang artinya Pemerintah Kabupaten Mamuju sudah mendekati keseimbangan antara pendapatan normal dengan pengeluaran operasional selama Tahun 2023.

d. Solvabilitas Jangka Pendek

Solvabilitas jangka pendek menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 12 bulan.

Rasio solvabilitas jangka pendek diukur dengan membandingkan antara Kas dan Setara Kas ditambah Investasi Jangka Pendek dengan Kewajiban Lancar. Semakin tinggi nilai rasio yang dihasilkan semakin banyak pula aktiva lancar yang tersedia untuk menjamin kewajiban lancar pemerintah daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju rasio solvabilitas Jangka Pendek sebesar 50,8287 yang artinya tersedia 50,8287 kali aktiva lancar untuk menyelesaikan kewajiban lancar senilai Rp1.677.035.725,51 selama periode Tahun 2023.

e. Solvabilitas Jangka Panjang

Solvabilitas jangka Panjang merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka Panjang.

Indikator ini menunjukkan keberlanjutan pemerintah daerah, yang dicerminkan melalui total aset dibagi dengan jumlah kewajiban jangka panjang yang harus dipenuhi.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Mamuju tidak memiliki Kewajiban Jangka Panjang sehingga untuk rasio solvabilitas jangka Panjang tidak dapat diukur.

f. Solvabilitas Layanan

Solvabilitas layanan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan public.

Indikator ini terwakili dalam rasio antara sumberdaya fasilitas/asset tetap yang dimiliki pemerintah daerah dengan jumlah warga yang dilayani oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi nilai rasio menunjukkan semakin tidak efisiennya pemerintah daerah dalam memberikan layanan.

Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju rasio solvabilitas layanan sebesar 7.329.592 yang artinya Pemerintah Kabupaten Mamuju memiliki aset senilai Rp7.329.592 untuk melayani 1 jiwa penduduknya pada tahun 2023.

6. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Pemerintah Kabupaten Mamuju mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berturut-turut dari BPK

atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sementara untuk LKPD Tahun 2023 masih dalam proses audit.

Opini WTP ini berdasarkan aspek kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan terhadap perundang-undangan atas LKPD yang disajikan setiap tahun.

Hasil tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh pada proses pengelolaan keuangan daerah. Sebab dimensi tersebut melihat dari proses perencanaan pembangunan di daerah sampai dengan proses pelaporan keuangan. Berbagai dokumen yang ditinjau yakni dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), APBD, LKPD sampai dengan opini BPK atas LKPD.

Setiap dimensi dilengkapi sejumlah indikator turunan. Misalnya, dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran yang mencakup beberapa indikator di antaranya, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD; kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA-PPAS; kesesuaian nomenklatur program KUAPPAS dan APBD; kesesuaian pagu program RKPD dan KUA-PPAS; dan kesesuaian pagu program KUA-PPAS dan APBD. Baik dimensi maupun indikator, keduanya dibangun untuk mengukur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, sampai dengan pengawasan keuangan.

Pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Kemendagri bakal memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.

Untuk Indikator sasaran ketiga Nilai LPPD kabupaten mamuju Berikut dapat digambarkan terkait capaian indikator nilai LPPD yaitu data yang dirilis pada Lakip pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2023 untuk skor hasil penilaian LPPD ada perubahan data dimana diralat dari capaian “tinggi” menjadicapaian “sangat rendah” dengan skor 1,34, hal inisehubungan dengan baru dirilisnya hasil evaluasi tersebut melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 100.2.13-1109, Tahun 2023, tentang Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional Tahun 2022 berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021 yang ditetapkan tertanggal 18 April 2023. Dimana data yang dilaporkan pada LAKIP 2023 terkait dokumen Keputusan Kemendagri ini belum di tetapkan sehingga data yang digunakan Pemkab Mamuju adalah hasil Koordinasi Bagian Pemerintahan dengan Tim EKPPD Pusat secara lisan dan hasil evaluasi tim EKPPD Provinsi

Dapat digambarkan pada nilai LPPD dari tahun 2022 yaitu sangat rendah diakibatkan oleh kondisi pasca bencana Gempa Bumi di Kab Mamuju pada 15 Januari 2021 dengan magnitudo (M6,2) yang berdampak besar pada korban jiwa dan infrastruktur di pemerintahan sehingga di tingkat OPD dukungan data Indikator masing-masing urusan susah untuk ditemukan dan disusun disebabkan pemulihan pasca Gempa hal ini menyulitkan pemenuhan data dukung dalam penyusunan LPPD Kabupaten Mamuju pada tahun tersebut.

Sedangkan sampai pada tahun 2023 dimana dari capaian LPPD dengan nilai "sangat rendah" sudah dapat ditingkatkan kembali sehubungan dengan perbaikan dan pembenahan administrasi Pemerintahan pasca gempa di Tingkat OPD sehingga dapat ditingkatkan nilai LPPD menjadi nilai "rendah"

Saat ini pemerintah Kabupaten Mamuju sementara melakukan langkah perbaikan dalam dukungan pelaksanaan evaluasi LPPD melalui antara lain :

1. Penguatan anggaran, Dimana OPD yg terkendala terkait belum tersedianya dukungan anggaran untuk pelaksanaan indikator daerah segera dilaporkan dan Pemerintah Kabupaten memberikan Solusi dengan menyediakan anggaran yg dibutuhkan.
2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur terkait pelaksanaan dan pelaporan data indikator LPPD, Dimana telah dilakukan sosialisasi baik bersama kemendagri selaku tim EKPPD Pusat maupun Tim Provinsi SulBar, coaching clinic dan pendampingan langsung ke OPD dalam penyusunan dok pelaporannya.
3. Penguatan kebijakan daerah, Dimana di optimalkan koordinasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan LPPD kabupaten mamuju baik dari pimpinan daerah kepada seluruh Jajaran Birokrasi dalam Pemerintahan Daerah yang langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyusunan realisasi target LPPD.

Tabel III - 5
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	80	90	78,75	87,50
Rata-rata capaian					87,50	

Pada sasaran Strategis 2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik ini disebutkan realisasi pada tahun 2022 adalah 78,75 %, dengan persentase capaian sebesar 87,50%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju

(LAKIP) Tahun 2023

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan oleh lembaga survei Rumah Data pada bulan Desember 2022. Untuk Tingkat kepuasan masyarakat 78,75% terakumulasi dari cukup puas sebesar 60,75% dan 18% sangat puas. Ini sangat positif dibandingkan dengan tingkat masyarakat yang kurang puas dan tidak puas sama sekali hanya sebesar 21,25%.”

Pada enam segmen kinerja yang diukur antara lain aspek pendidikan, kesehatan, kependudukan, perizinan, persampahan serta air bersih dan sanitasi, hanya di aspek persampahan yang masih lemah yakni sebesar 44,50%.

Meski masih mendapat catatan dalam hal infrastruktur, tapi masyarakat cukup puas dengan upaya penanganan dampak bencana gempa dan banjir yang dilakukan oleh Bupati Mamuju.

Tabel III - 6
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	100	60	72	120
2	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	100	60	68	113,3
Rata-rata capaian						116,6

Di tahun 2023 untuk indikator Indeks Pembangunan Infrastruktur Pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh Kabupaten Mamuju lebih fokus pada Infrastruktur Jalan, Jembatan, Infrastruktur Pendukung kemandirian pangan, juga Fasilitas Infrastruktur. dimana tujuan tersebut untuk memprioritaskan peningkatan konektivitas antar wilayah, pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dengan realisasi Indikator sebesar 60 % dari target 72 % atau disimpulkan capaian kinerja sebesar 120 %.

Jalan merupakan sarana angkutan darat yang penting untuk kegiatan perekonomian. Tersedianya jalan yang berkualitas akan meningkatkan usaha pembangunan khususnya dalam upaya memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 mencapai 849,04 kilometer.

Panjang jalan yang berada di bawah wewenang negara ada 114,52 kilometer, dibawah wewenang provinsi ada 208,35 km dan sisanya di bawah wewenang kabupaten sebanyak 526,17 kilometer. Pada tahun tersebut, jalan yang diaspal sepanjang 207,71

km, kerikil 141,76 km, tanah sepanjang 73,5 km dan lainnya 103,2 km.

di Kabupaten Mamuju Panjang jalan yang ditingkatkan sebesar 5,888 meter, serta 58,9 Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik. selain itu juga kisaran 69,1 Meter Panjang jembatan yg dibangun, 8,126 Jumlah unit rumah korban bencana yang Direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi, 156 Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan, 8587 Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi serta prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota.

Sedangkan untuk Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur terealisasi sebesar 60 % dari target 68 % atau disimpulkan capaian kinerja sebesar 113 %. Dengan uraian sebagai berikut :

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran umpan balik untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju. Selain mengukur kepuasan masyarakat, juga akan diinventarisasi keinginan serta harapan dari masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamuju. Pengukuran akan dilakukan secara agregat per-jenis infrastruktur sehingga kelemahan maupun kelebihan suatu Program/Kegiatan dapat diidentifikasi.

Secara eksplisit, dampak yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur adalah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, menurunkan jumlah pengangguran, meningkatkan nilai investasi daerah, membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, mendukung ketahanan pangan, dan lain-lain. Selain itu juga kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap Perekonomian. Dasar pemikiran pemilihan variabel sebagai indikator terpenuhinya aspek efektivitas antara lain :

1. Ketersediaan fisik (availability) : bahwa dalam setiap aktivitas belanja yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik tentunya akan menghasilkan output yang berupa barang secara fisik. Hal ini diartikan bahwa ketersediaan secara fisik mutlak harus dipenuhi oleh aktivitas belanja fisik;
2. Kualitas fisik (quality) : kualitas output yang dihasilkan. Bahwa aspek efektivitas akan lebih nyata apabila cakupannya lebih luas, yaitu tidak hanya keterpenuhan secara fisik tetapi juga didukung kualitas output yang baik dan optimal;
3. Kesesuaian (appropriateness) : kesesuaian antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dilandasi dasar pemikiran

bahwa kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan akan memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat selaku penerima manfaat;

4. Pemanfaatan (utility) : tingkat pemanfaatan atas output yang telah dihasilkan, yaitu semakin besar pemanfaatan atas output maka semakin besar pula tingkat efektivitasnya;
5. Penyerapan tenaga kerja (job creation);
6. Kontribusi terhadap perekonomian. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan perekonomian sehingga perlu untuk menilai seberapa besar infrastruktur memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan perekonomian di Kabupaten Mamuju.

pada Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di Kantor Kecamatan, Ketersediaan aparatur pemadam kebakaran selama 24 jam, dilaksanakan secara bergantian dan absensi apel tenaga bantuan operasional (TBO) Pemadam Kebakaran. selain itu diadakannya Rumah Sakit yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya. pada sektor ketenagakerjaan tercatat 1,181 Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota serta 56 Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi.

Tabel III -7
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 4
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	78,94	80	77,64	97,05
2	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	100.00
Rata-rata capaian						98,52

untuk indikator sasaran satu Indeks Kualitas Lingkungan hidup pada Sasaran Strategis 4 Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup. Mendasari Rancangan RPJMN bahwa kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. terdapat strategi yang akan dilakukan yaitu berupa penguatan

sistem pemantauan kualitas lingkungan hidup; penguatan mekanisme pemantauan dan sistem informasi lingkungan hidup dan penyempurnaan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)

pada kabupaten Mamuju ditahun 2023 Capaian Kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 97,05 % berdasarkan Realisasi Indikator Sasaran sebesar 77,64 % diperbandingkan dengan Target sebesar 80,00 %.

berdasarkan Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Iklh) Kabupaten Mamuju Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. Data Target dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Mamuju tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.8
perbandingan Target dan Capaian IKLH Kabupaten Mamuju tahun 2023

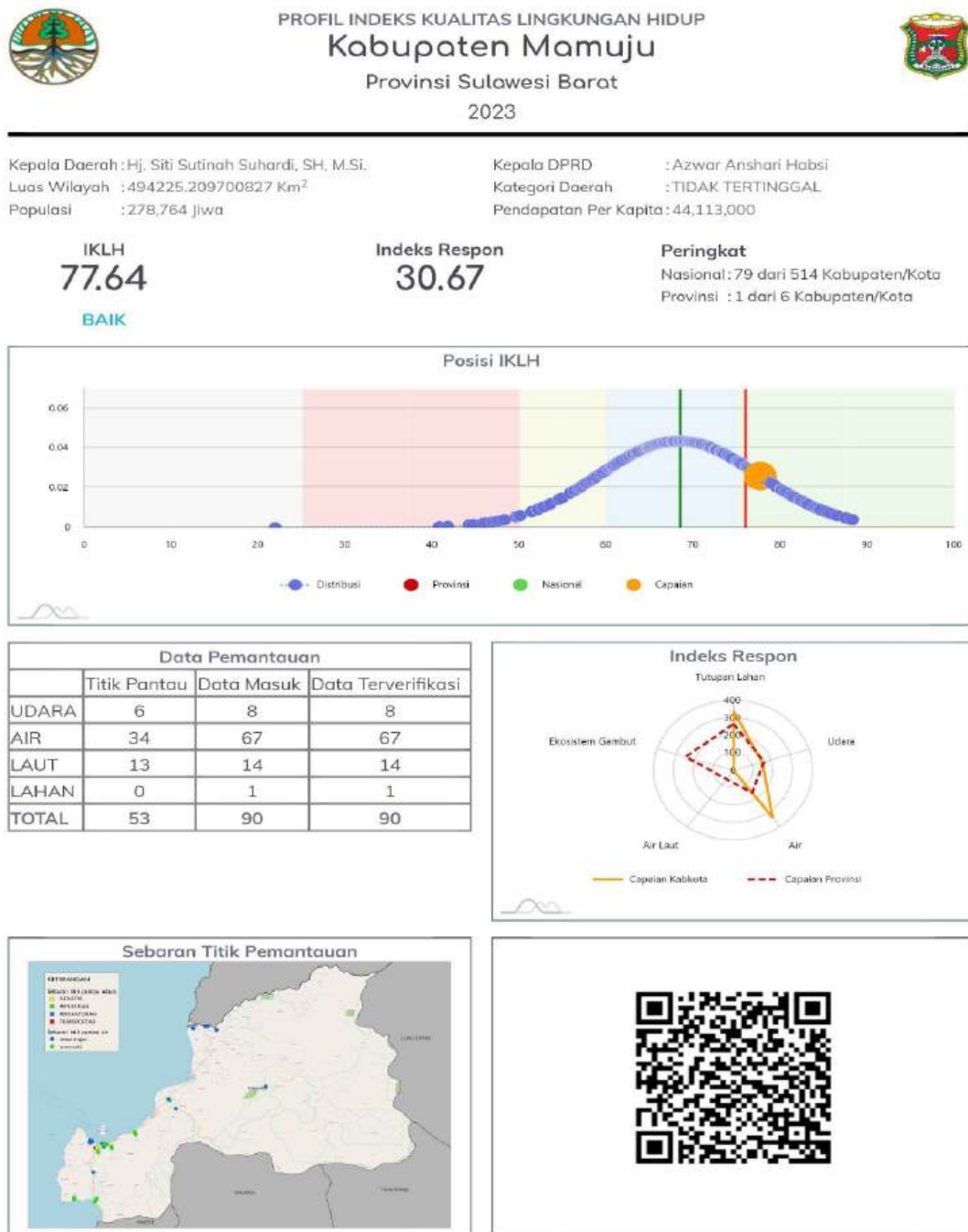
No	Jenis Indeks	Target	Capaian	Kriteria	Keterangan
1	Indeks Kualitas Air (IKA)	60,3	55,7	Sedang	Belum memenuhi target
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,79	94,89	Sangat Baik	Memenuhi target
3	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	85,11	83,45	Baik	Belum memenuhi target
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	77,68	77,64	bAIK	Belum memenuhi target

Sumber : Laporan IKLH kabupaten Mamuju- KLHK RI, 2023

2. Capaian IKLH kabupaten Mamuju termasuk dalam kategori baik dan menempati peringkat nasional : 79 dari 514 kabupaten/kota, dan peringkat :1 dari 6 kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat,
3. Beberapa catatan terkait dengan capaian IKLH kabupaten Mamuju tahun 2023 :
 - a. Tidak tercapainya nilai IKA dikarenakan air sungai yang menjadi titik sampel telah masuk dalam kategori “camar ringan”.
Jumlah sungai yang menjadi sampel sebanyak 10 (sepuluh) sungai, dan dari masing-masing sungai diambil 3 (tiga) titik sampel yang mewakili titik hulu, tengah dan hilir sungai. Berdasarkan hasil uji laboaratorium terhadap sampel 10 air sungai dari masing-masing titik sampel diketahui bahwa untuk parameter Biochemical Oxygen Demand (BOD) pada seluruh sungai yang dipantau, diketahui nilai hasil uji seluruh sungai telah melebihi standar baku mutu air sungai. Selain itu, untuk paramater Total Suspended Solid (TSS) pada 10 sungai yang dipantau, terdapat 6 (enam) sungai dengan nilai hasil uji telah melebihi standar baku mutu air sungai. Begitu pula dengan parameter

- Chemical Oxygen demand (COD) dari 10 sungai yang dipantau, 5 sungai diantaranya untuk nilai COD telah melebihi standar baku mutu air sungai.
- b. Untuk memastikan faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya kondisi nilai hasil uji air limbah melebihi standar baku mutu perlu penelitian lebih lanjut. Secara hipotetik, nilai BOD, COD dan TSS yang melebihi baku mutu dapat disebabkan oleh cemaran air limbah rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai, cemaran limbah pertanian seperti pupuk, pestisida, ; atau terjadinya perubahan alamiah seperti erosi, pada daerah2 tertentu pada bagian sungai,
 - c. Untuk Parameter Indeks Kualitas Lahan, juga masih belum memenuhi target, dikarenakan belum adanya produk hukum daerah yang mengatur tentang penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kabupaten Mamuju. Kondisi ini menyulitkan untuk menentukan luasan kawasan RTH kabupaten Mamuju. Selain itu, keterbatasan sumber data dukung seperti peta kawasan tutupan lahan terbaru juga mempengaruhi kemampuan untuk identifikasi kawasan RTH Mamuju
 - d. Untuk Parameter indeks kualitas udara telah memenuhi target yang ditetapkan, untuk itu perlu dipertahankan dengan mengurangi perubahan fungsi lahan, khususnya kawasan hutan dan RTH serta Sabuk Hijau (*Green belt*) kabupaten Mamuju, sehingga kemampuan tegakan hutan, RTH serta sabuk hijau dalam mengurangi polusi tidak berkurang.
4. Untuk perbaikan IKLH kabupaten Mamuju kedepan, adalah perlunya melakukan penelitian yang lebih lanjut untuk mengetahui faktor- faktor penyebab parameter air sungai melebihi baku mutu. Data tersebut penting sebagai acuan untuk formulasi kebijakan perbaikan kualitas air sungai sekaligus menjaga kualitas air sungai semakin baik. Kualitas air sungai yang baik sangat penting untuk mendukung kualitas hidup yang baik bagi setiap rumah tangga.
 5. Perlu penguatan kebijakan hukum terkait dengan penetapan kawasan RTH. Hal ini penting untuk mengetahui apakah luasan RTH kabupaten Mamuju telah sesuai dengan standar yang ditentukan peraturan perundang-undangan, dan juga sekaligus untuk mencegah perubahan fungsi kawasan RTH.

Gambar III.1 Raport IKLH Kabupaten Mamuju Tahun 2023



Pada indikator sasaran dua Indeks Resiko Bencana pada Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup Berdasarkan kepada prioritas pelaksanaan pengurangan risiko bencana dan kerangka berpikir dalam manajemen risiko bencana gempa dan tsunami berbasis edukasi bagi masyarakat di wilayah rawan gempa dan tsunami, maka upaya dan rencana aksi yang dilakukan meliputi: meletakkan pengurangan risiko bencana yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat dan memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat.

Manajemen risiko bencana gempa bumi dan tsunami yang didalamnya merupakan pengaturan upaya penanggulangan bencana dengan penekanan pada faktor - faktor

yang mengurangi risiko secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh pada saat sebelum terjadinya bencana, membutuhkan keterlibatan multi pihak dan partisipasi komunitas. Dengan semakin besar keterlibatan mereka akan dapat meningkatkan kapasitas dalam meminimalkan risiko bencana gempa bumi dan tsunami. Manajemen risiko bencana gempa bumi dan tsunami harus dilakukan dengan pendekatan edukasi dari berbagai pihak dalam upaya untuk mengatasi bencana tersebut. Melalui pendekatan ini diharapkan masyarakat dapat secara simultan mendapatkan pengetahuan tentang gempa bumi dan tsunami, mengerti tentang sikap yang akan dilakukan pada saat terjadi bencana gempa bumi dan tsunami serta selalu menerapkan kesiapsiagaan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami.

Gambar III.2
Peta indeks Resiko Bencana di Indonesia



Peta risiko mendesak dibutuhkan, khususnya bagi pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk memetakan langkah pencegahan hingga penanganan saat bencana alam terjadi. Khusus Sulawesi Barat, Pemetaan dan

Risiko Bencana wilayah tergolong dalam klasifikasi daerah yang memiliki risiko tinggi bencana. indeks bahaya gempa di kabupaten Mamuju, merupakan indeks risiko bencananya sangat tinggi diantara 6 Kabupaten di Sulawesi Barat, Dari informasi awal pasca bencana terjadi akan memudahkan daerah dan pihak terkait lainnya untuk melakukan penanganan cepat. Tak hanya untuk menekan banyaknya korban yang terdampak namun juga dapat meminimalisir kerugian material yang mungkin ditimbulkan. kita memerlukan informasi dasar mengenai seberapa luas cakupan daerah terdampak, berapa luas lokasi terpapar, potensi korban jiwa dan luka, dan berapa banyak potensi bangunan yang terpapar. Ini menjadi dasar utama peta operasi yang nantinya menjadi panduan di dalam posko. Agar pelaksanaan pemberian bantuan stimulan rumah akibat bencana dapat terlaksana dengan cepat, tepat sasaran, tertib,

lancar dan akuntabel dan Terdatanya bangunan rumah terdampak bencana untuk kategori rumah rusak berat, Rusak Sedang dan rusak ringan dengan dengan melakukan assesmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kabupaten Mamuju.

berdasarkan data dari InaRisk Pada Tahun 2023 indikator Indeks Resiko Bencana di Propinsi Sulawesi Barat, kabupaten mamuju mendapatkan predikat Tinggi atau dengan hasil capaian Kinerja 100 %. dengan skala kategori Tinggi diantara 5 Kabupaten lainnya.

Tabel III - 9
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan,
Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,88	68,50	69,61	101,62
2	Indeks Pendidikan	Skala	0,63	0,36	0,64	177,77
3	Indeks Kesehatan	Skala	0,741	0,556	0,748	134,53
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	9,668	24.000	10,075	41,97
5	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,38	59,58	60,59	101,69
6	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	98	60	43	88,33
Rata-rata capaian						107,96

Untuk bidang Pendidikan Salah satu indikator untuk mengukur taraf pendidikan pada IPM yaitu dengan menghitung rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). RLS adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

Pada tahun 2023, rata-rata lama sekolah penduduk berumur 25 tahun ke atas di Kabupaten Mamuju adalah 8,16 tahun. Artinya bahwa rata-rata penduduk berumur 25 tahun ke atas menyelesaikan pendidikan hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII. Dibandingkan dengan RLS tahun 2016, rata rata lama sekolah hanya berkisar 7,21 tahun. Harapan lama sekolah Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 telah mencapai 13,26 tahun yang berarti secara rata-rata anak usia tujuh tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah

selama 13,26 tahun atau dengan kata lain dapat menyelesaikan pendidikan level perguruan tinggi tahun pertama (kondisi ini pula setara dengan lulusan Diploma I). Selama periode 2016 hingga 2023, HLS Kabupaten Mamuju telah meningkat sebesar 0,29 tahun.

Selama periode 2016-2023, harapan lama sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 0,53 persen atau mengalami kenaikan secara rata-rata sebesar 0,04 tahun setiap tahunnya. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang telah semakin membaik.

Seiring dengan semakin giatnya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun mendatang, capaian RLS dan HLS juga akan ikut mengalami peningkatan. Kondisi ini memang tidak menutup kemungkinan karena sudah banyak program / kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju seperti rehabilitasi sarana pendidikan, pemenuhan kelengkapan pendidikan, kemudahan akses sarana pendidikan, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga pendidik dan beragam kebijakan lainnya. Tingkat ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk di Kabupaten Mamuju juga mencerminkan bagaimana tingkat pendidikan masyarakatnya.

Pada tahun 2023, masih terdapat sekitar 44,93 persen penduduk 15 tahun keatas di Kabupaten Mamuju yang tingkat pendidikannya dibawah SMP. Rincian dari kondisi tersebut yakni sebanyak 18,76 persen yang tidak memiliki ijazah dan selebihnya sebanyak 26,17 persen hanya memiliki ijazah setingkat SD. Beberapa hal yang dapat menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Persebaran penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Mamuju menurut ijazah terakhir yang dimiliki.

untuk bidang Kesehatan Salah satu dimensi pembetukan IPM adalah kesehatan yang didasarkan pada pendekatan umur harapan hidup (UHH), pada tahun 2020, UHH Kabupaten Mamuju sebesar 67,52 tahun. Raihan ini mengalami peningkatan hingga mencapai 68,66 tahun di tahun 2023. Sedangkan jika diukur melalui pendekatan lainnya, UHH Kabupaten Mamuju tahun 2023 mencapai 71,79 tahun setelah sebelumnya hanya berada pada kisaran 70,71 tahun di tahun 2020. Meningkatnya posisi UHH Kabupaten Mamuju selama beberapa tahun terakhir merupakan hasil dari upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian UHH ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2023, bayi yang lahir di tahun tersebut akan dapat hidup hingga usia 71 tahun.

Peningkatan umur harapan hidup Kabupaten Mamuju menunjukkan peningkatan kualitas layanan sarana dan prasarana kesehatan yang ada. Ada banyak faktor yang dapat mendukung peningkatan umur harapan hidup seperti gaya hidup sehat, kualitas lingkungan, faktor genetika – biologis, tingkat pendidikan, layanan dan fasilitas kesehatan, hingga ke teknologi inovasi medis dan masih banyak faktor lainnya. Akan tetapi tidak semua faktor tersebut dapat diinterfensi oleh pemerintah. Hanya sebagian kecil yang dapat disediakan oleh pemerintah sebagai pendukung layanan kesehatan, seperti fasilitas layanan kesehatan dan teknologi medis saja, selebihnya itu memang dituntut peran serta dari masyarakatnya sendiri agar dapat berperilaku hidup sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Penyediaan teknologi dan inovasi medis sebagai salah satu bentuk investasi kesehatan yang dapat meningkatkan peluang UHH yang lebih tinggi dapat berupa penyediaan alat-alat deteksi dini bagi ibu hamil hingga ke semua layanan kesehatan yang ada di masyarakat, seperti di tingkat puskesmas. Dengan adanya alat deteksi dini seperti USG maka peluang adanya bayi yang lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, komplikasi dapat dihindari sedari awal. Akan tetapi, dengan investasi ini jelas akan membutuhkan biaya dan sumber daya yang tidak sedikit. Akan tetapi pemerintah tidaklah tinggal diam, upaya peningkatan UHH tetap terus dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang sudah ada. Salah satunya melalui pendekatan layanan persalinan terakhir dengan bantuan tenaga medis. Capaian UHH Kabupaten Mamuju yang sebesar 71,79 tahun 2023 tidak terlepas dari upaya maksimal yang telah dilakukan oleh tenaga medis yang tersebar di seluruh pelosok daerah Kabupaten Mamuju, tentunya tanpa mengesampingkan peran serta tenaga persalinan terakhir non medis. Karena tenaga persalinan terakhir non medis ini tentunya sudah dibekali oleh pengalaman dan kepercayaan dalam membantu proses persalinan terakhir.

Ditahun 2023, tingkat keterlibatan tenaga medis dalam memberikan pertolongan proses persalinan terakhir di Kabupaten Mamuju mencapai 89,25 persen. Dengan kondisi ini mencerminkan bahwa secara tidak langsung keberadaan tenaga medis telah membawa dampak positif terhadap peningkatan UHH. Tidak hanya itu, kontribusi tenaga non medis juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam menolong persalinan terakhir. Pada tahun yang sama, peran tenaga non medis ini berperan hingga 10,75 persen.

Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (harga konstan 2012) yang disesuaikan. Dalam paradigma pembangunan ini, pendapatan adalah ukuran untuk menguasai sumber daya agar dapat hidup dengan layak. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk mendukung

standar hidup yang layak. Sumber daya atau barang dan jasa itu adalah sebagai wahana untuk meningkatkan kemampuan individu dari segi pendidikan, keterampilan, kesehatan, kemampuan dalam pergaulan di masyarakat, dan lain sebagainya. Selama kurun waktu 2016-2023, pengeluaran per kapita riil disesuaikan di Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan hingga 2,07 persen. Selama waktu tersebut, pengeluaran per kapita riil mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Dari kondisi tahun 2016 hingga COVID-19 melanda, pengeluaran per kapita riil disesuaikan masyarakat Kabupaten Mamuju mengalami peningkatan sebesar 846 ribu rupiah. Kemudian, pada masa pandemi COVID-19 (2019-2021) menunjukkan penurunan pengeluaran riil per kapita dari 9,53 juta rupiah menjadi 9,49 juta rupiah. Kemudian pada tahun 2023, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Mamuju sebesar 10,08 juta rupiah per kapita. Jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya, pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Mamuju meningkat 407 ribu rupiah.

berdasarkan Uraian diatas maka Untuk Indikator pertama pada sasaran Strategis ini Indeks Pembangunan Manusia dijelaskan bahwa Capaian kualitas hidup tercermin melalui IPM. Tahun 2023, capaian IPM Kabupaten Mamuju sebesar 69,61. Capaian Kinerja indikator ini sebesar 101,62 persen , yang dimana realisasi Indikator sebesar 69,61 melebihi dari target sebesar 68,50.

pada indikator sasaran kedua yakni Indeks Pendidikan di uraikan bahwa Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendidikan berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) metode terbaru yang dikeluarkan Badan Pusat Statistika (BPS) adalah Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

adapun Rumus yang digunakan untuk menghitung indeks pendidikan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah:

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

pada tahun 2023 Kabupaten Mamuju mencapai Nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 13,26 dan Rata-Rata Lama Sekolah sebesar 8,16.

berdasarkan dengan rumusan yang ada maka didapatkan skala pada Indeks Pendidikan Sebesar 0,63 dari target yang tertuang sebesar 0,36. atau dengan kata lain pada indeks Pendidikan ditahun 2023 nilai persentase yang dicapai sebesar 177,77 Persen.

pada Indikator Sasaran Ketiga yakni Indeks Kesehatan dijelaskan bahwa Salah satu sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah adalah bidang kesehatan. Faktor kesehatan menjadi salah satu penopang kualitas pembangunan manusia. Sarana

kesehatan dan sumber daya manusia merupakan dua hal yang memiliki keterkaitan dalam meningkatkan kesehatan manusia.

Salah satu elemen penting dalam hal peningkatan derajat dan status kesehatan penduduk selain ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan adalah tenaga medis yang mumpuni kemampuannya akan meningkatkan peluang penyelesaian masalah kesehatan. Ketersediaan tenaga medis yang mumpuni seharusnya dapat dimiliki mulai dari jenjang penolong persalinan. Sebab pada fase inilah siklus hidup seseorang dimulai, sekaligus pada fase inilah ada dua nyawa yang harus ditangani secara bersamaan dalam suatu rangkaian proses. Tentu saja hal ini sangat berkaitan dengan upaya menurunkan angka kematian bayi dan angka kematian ibu saat melahirkan, di mana pemerintah mengupayakan agar para ibu hamil dapat melahirkan dengan selamat, demikian pula bayi yang dilahirkan dapat terlahir dengan selamat.

Pada Tahun 2023, persentase perempuan berumur 15-49 tahun yang melahirkan dengan dibantu tenaga medis sudah mencapai 89,25 persen. Namun demikian, jika dirinci menurut kelompok pengeluaran, ibu yang melahirkan dan tergolong ke dalam 40 persen golongan rumah tangga dengan pengeluaran terendah, 20,77 persen diantaranya masih ditolong bukan oleh tenaga medis. Sedangkan ibu yang tergolong dalam 20 persen rumah tangga dengan pengeluaran terbesar sudah 100 persen yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis.

Pada tahun 2023, sarana kesehatan di Kabupaten Mamuju sudah cukup beragam. Jumlah rumah sakit yang sudah beroperasi sebanyak empat unit yang terdiri dari RS Regional Provinsi Sulawesi Barat, RSUD Kabupaten Mamuju, RS Mitra Manakarra Mamuju, dan RS Bhayangkara Mamuju.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Mamuju, perempuan lebih banyak mengalami keluhan sakit dengan persentase sebesar 15,05 persen sedangkan untuk laki-laki hanya sekitar 13,75 persen. Di lain sisi, menurut kelompok pengeluaran, pengeluaran menengah (40 persen menengah) memiliki persentase angka kesakitan yang paling tinggi yaitu sebesar 18,88 persen. Kemudian, diikuti dengan pengeluaran terkecil (40 persen terbawah) yaitu sebesar 11,50 persen. Terakhir, dengan pengeluaran terbesar (20% atas) yaitu sebesar 11,11 persen. Artinya, mereka yang berkategori pengeluaran terbesar lebih dapat melakukan pencegahan sebelum sakit dibandingkan kategori pengeluaran lainnya.

Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan pernah menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan, persentasenya sebesar 71,92 persen. Dimana,

penduduk laki-laki lebih memanfaatkan jaminan kesehatan dibandingkan perempuan. Untuk penduduk yang tidak rawat jalan, 51,73 persen mengobati sendiri, 43,20 persen merasa tidak perlu, dan 5,07 persen lainnya seperti takut terpapar COVID-19 dan tidak ada biaya transportasi.

ibu dengan pendidikan SMP ke atas lebih banyak memanfaatkan tenaga medis dalam persalinannya dibandingkan dengan ibu dengan pendidikan SD ke bawah. Hal ini mengonfirmasi teori yang menyatakan bahwa semakin besar pendapatan seseorang (yang di proksi dari porsi pengeluaran) serta semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan semakin sadar terhadap tingkat kesehatannya.

Selain tenaga penolong persalinan, hal lain yang patut menjadi perhatian adalah infrastruktur kesehatan. Pemanfaatan infrastruktur menunjukkan kemudahan akses dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2023, puskesmas/pustu adalah fasilitas kesehatan tujuan utama penduduk Kabupaten Mamuju untuk berobat jalan. Lebih dari separuh (56,38 persen) penduduk Kabupaten Mamuju memilih puskesmas sebagai pilihan pertama untuk berobat jalan, disusul praktik dokter/bidan sekitar 22,74persen, kemudian rumah sakit pemerintah sekitar 11,13 persen dan lainnya seperti rumah sakit swasta dan praktik pengobatan tradisional sebesar 9,75 persen.

menurut hasil pendataan Statistik di tahun 2023 Angka Harapan Hidup di Kabupaten Mamuju sebesar 68,66 Persen, berdasarkan data tersebut maka didapatkan Skala Indeks Kesehatan dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{\text{Kesehatan}} = \frac{AHH - AHH_{\min}}{AHH_{\max} - AHH_{\min}}$$

berdasarkan rumus yang digunakan dalam Skala Indeks Kesehatan maka didapatkan nilai Skala sebesar 0,748 dari target 0,556 atau dengan capaian Persentase sebesar **134,53** Persen.

Pada Indikator Sasaran Keempat yakni Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli) diuraikan bahwa Penduduk Kabupaten Mamuju dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, di tahun 2020 saja menurut hasil sensus penduduk 2020 mencapai 294.338 dengan tingkat kepadatan sebesar 59 jiwa per km². Dilihat dari pertambahan jumlah penduduk tentunya akan membawa dampak terhadap tingkat kesejahteraan. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk dapat dilihat dari golongan pengeluaran. Semakin rendah golongan pengeluaran menggambarkan semakin rendah tingkat kesejahteraan, demikian juga sebaliknya, jika semakin tinggi golongan pengeluaran menggambarkan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan.

Selain itu tingkat kesejahteraan juga bisa digambarkan dari pola konsumsi masyarakat. Secara garis besar konsumsi masyarakat dapat dikelompokkan dalam 2 kategori besar, yaitu kebutuhan makanan dan non makanan. Pada tingkat pendapatan tertentu, rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kedua kebutuhan tersebut. Secara alamiah kuantitas makanan yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik maksimum sementara kebutuhan non makanan, tidak akan ada batasnya. Sehingga, besaran pendapatan yang dibelanjakan untuk makanan dari suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut.

Hal ini juga tercermin di Kabupaten Mamuju pada masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi ternyata pengeluaran makanannya juga lebih tinggi dibandingkan pengeluaran makanan, pada tahun 2023 secara rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Mamuju untuk makanan sebesar Rp 541.678,- dan non makanan Rp 552.398,-. Dengan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan pada tahun 2023 sebesar Rp 1.094.076,- artinya dalam sehari rata-rata satu orang penduduk Kabupaten Mamuju mengeluarkan biaya sebesar Rp 36.469,- untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan.

Apabila dilihat dari keterbandingan tingkat kesejahteraan, dari tingkat kesejahteraan rendah ke tingkat kesejahteraan tinggi, pengeluaran baik makanan maupun non makanan terus bergerak naik. Pada penduduk 40 persen terbawah pengeluaran makanan lebih tinggi daripada pengeluaran non makan, Rp 303.539,- untuk makanan dan Rp 210.499,- untuk non makanan, begitu pula pada penduduk 40 persen menengah dimana pengeluaran makanan lebih besar daripada bukan makanan. Pola ini bergeser pada penduduk dengan tingkat kesejahteraan 20 persen teratas. Pengeluaran makanan mencapai Rp 1.069.502,- makanan dan Rp 1.407.357,- non makanan, dengan selisih sebesar Rp 337.855,-.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan rata - rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan dengan Daya Beli hanya sebesar Rp. 10,075 Rupiah. Hal ini masih cukup jauh dari target yang tertuang dalam RPJMD atau pada Indikator sasaran Sasaran Keempat yakni sebesar Rp. 24,000 Rupiah. dengan kata lain capaian Kinerja pada tahun 2023 pada indikator ini hanya sebesar 42 %.

untuk indikator sasaran kelima yaitu Indeks Pembangunan Gender atau IDG dipaparkan bahwa pada tahun 2023 di kabupaten mamuju Semakin banyak perempuan menjadi pemimpin baik di desa, sebagai kepala desa atau kepala daerah. Perempuan semakin berdaya, mampu memberikan sumbangan pendapatan signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan terlibat dalam politik

pembangunan dengan meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, Pegawai negeri sipil yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Mamuju mencapai 4.324 orang. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang 4.393 pegawai. Jika dilihat menurut jenis kelamin, sekitar 56,61 persen PNS Kabupaten Mamuju adalah perempuan dan 43,38 persen laki laki.

Pada tahun 2023, komposisi wakil rakyat di DPRD Kabupaten Mamuju berjumlah 30 orang, terdiri dari 27 orang laki-laki dan 3 orang perempuan atau 10 persen dari total Anggota DPRD Kabupaten Mamuju. Meskipun, dalam praktiknya, tidak semua perempuan yang berkecimpung di bidang politik memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis. Namun setidaknya, mereka mampu merepresentasikan kehadiran serta menyuarakan aspirasi perempuan di level kebijakan pemerintah.

berdasarkan rilis data BPS pada bulan April ditahun 2023 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Mamuju tercatat sebesar 60,59 % yang dimana persentase yang tertuang pada target Indikator sasaran kelima ini sebesar 59,58% terdapat peningkatan sebesar 1,01 atau dengan kata lain capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 101,6 % . IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan, Kabupaten Mamuju mendasari empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Di samping itu, langkah strategis disiapkan untuk mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's), terutama tujuan kelima yaitu kesetaraan gender.

Pertama, di bidang pendidikan. Pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana. Ketiga, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

Terakhir, yang keempat ialah terkait pencegahan kekerasan. Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan.

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan Analisis Kemiskinan dan Ketimpangan dimana hal tersebut menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan pada suatu Daerah. Dengan melakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penentuan nilai minimum dan maksimum untuk setiap indikator dan evaluasi.

Untuk mendapatkan capaian tersebut digunakan rumus 40% Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial + 30% Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial + 30% Persentase PSKS yang aktif. Dimana data tersebut diperoleh dari dinas terkait berdasarkan realisasi Program Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022.

merujuk pada data Kemiskinan dan Ketimpangan yaitu Indeks Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mamuju pada tahun 2023 ini mendapatkan capaian Kinerja sebesar 88,33 % yang dimana target dari Indikator sebesar 60 % dan realisasi yang didapatkan sebesar 53 %. hal tersebut disebabkan masih terdapat kelemahan-kelemahan didalamnya diantaranya Karena Rumah Singgah/Shelter belum tersedia sehingga Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah belum dapat dilaksanakan, Karena tidak adanya permintaan dari keluarga klien, untuk dibuatkan rekomendasi / Pelatihan sehingga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk tidak dapat dilakukan. namun terdapat pula beberapa keberhasilan yang telah dilakukan oleh pemerintah diantaranya terdapat 46 pengaduan yang ditangani pada pelanggaran dan pengaduan trantibum lintas Kab/ Kota, tersedianya SOP Bidang Penegakan Peraturan Perundang- undangan Tahun 2023 dalam dalampenegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum, dan lain sebagainya.

Tabel III - 10
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 6
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	85	100	99,57	99,57
2	Indeks Kriminilitas	Persen	85	100	99,57	99,57
Rata-rata capaian						99,57

Pada tahun 2023 untuk Sasaran Strategis 6 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum mencakup 2 (dua) Indikator yang mendukung dalam Pencapaiannya yakni Indikator 1. Indeks ketentraman dan ketertiban dan Indikator 2. Indeks Kriminalitas.

Dalam pencapaian Kinerja sasaran Strategis Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum memperoleh hasil sebesar 99,57 %, capaian ini berbanding lurus dengan Indikator sasaran Indeks Kriminalitas yang dimana ditahun 2023 tingkat kejahatan di Mamuju cenderung rendah. Hal ini dapat tercermin dari persentase penduduk yang mengalami korban kejahatan hanya sekitar 0,43 persen. Capaian ini tentunya menggembirakan karena sebagai ibukota provinsi, Mamuju masih tergolong dalam wilayah aman. Meski demikian, jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki lebih banyak yang menjadi korban kejahatan dibandingkan dengan perempuan. Hal ini mungkin terjadi sebab laki-laki lebih banyak yang meninggalkan rumah hingga larut malam sementara kecenderungannya, tindak kejahatan terjadi saat larut malam dimana keadaan sepi dan mendukung berbagai modus operandi.

Tabel III - 11
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 7
Meningkatnya pertumbuhan sektor- sektor unggulan daerah

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	
			Target	Realisasi		
1	Indeks Gini	Persen	0,39	0,28	0,37	75,67 %
2	Pertumbuhan ekonomi	Persen	315	5.5-5.6%	4,37	78,73 %
Rata-rata capaian						77,15

Pada tahun 2023 Indeks Gini di Kabupaten Mamuju mencapai realisasi sebesar 0,37 % dari target 0,28 % dengan kata lain capaian Kinerja dari Indikator Indeks Gini pada tahun 2023 sebesar 75,67 % yang dimana indeks gini digunakan untuk mengetahui Ketimpangan pendapatan yang merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata.

Jika dilihat dari rasio ketimpangan pendapatan, pada tahun 2023 gini rasio di kabupaten mamuju sebesar 0.37. Masih tergolong moderat, namun pemerintah tetap memberi perhatian intensif terhadap masalah ketimpangan. Penurunan ini didukung dengan data lain seperti tingkat kedalaman dan keparahan. Pada tahun yang sama, tingkat kedalaman kemiskinan di kabupaten mamuju sebesar 0,79, membaik dibandingkan tahun 2022 sebesar 0.98. Sementara itu untuk tingkat keparahan angkanya mencapai 0,13 atau turun 0,05 dibandingkan tahun 2022. Kedua angka tersebut memberikan gambaran umum tentang kondisi masyarakat miskin yang semakin mengelompok dan relatif homogen dalam hal variasi pengeluarannya. Informasi ini membuat penentuan strategi penanggulangan dan penanganan kemiskinan menjadi lebih mudah karena karakteristik subjek yang akan ditangani memiliki ciri yang hampir sama. Artinya target penanganan melalui program pemerintah akan lebih terarah.

Pertumbuhan ekonomi adalah berkembangnya aktivitas-aktivitas di dalam suatu perekonomian yang menjadikan produksi barang dan jasa di masyarakat Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Mencapai 3,15 persen. Dilihat dari data jumlah penduduk miskin, Kabupaten Mamuju masih cukup rendah dibandingkan kabupaten lain. Jumlah penduduk miskin kabupaten mamuju pada 2023 diperkirakan sebanyak 23,70 ribu atau tidak sampai setengah dari yang tertinggi di polewali mandar yang mencapai 72,87 ribu orang.

Berdasarkan Data Mamuju Dalam Angka Tahun 2024, untuk indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju ditahun 2023 mencapai realisasi 4,37 % dari target Indikator Sebesar 5.5-5,6 % atau dengan kata lain Capaian Kinerja sebesar 78,73 %.

salah satu faktor yang membanggakan bagi kabupaten Mamuju yaitu Menteri dalam Negeri telah menyampaikan hasil survey Badan Pusat Statistik (BPS) per bulan April 2023, dengan sebuah hasil yang mengejutkan. Kabupaten Mamuju menorehkan prestasi sebagai peringkat pertama Daerah Dengan Angka Inflasi Terendah se-Indonesia dengan nilai hanya 2.96%. Angka ini bahkan berada di atas Capaian Inflasi Nasional dengan angka 4.33%. Tadinya Kabupaten Mamuju hanya masuk ke dalam peringkat 10 besar, tapi kemudian melejit ke peringkat pertama.

Tabel III - 12
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 8
 Meningkatnya investasi daerah

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	Pertumbuhan Investasi	Persen	33,94	15	68,27	455
Rata-rata capaian						455

Pada Indikator Pertumbuhan Investasi Tahun 2023 di Kabupaten Mamuju tercatat bahwa Realisasi Pertumbuhan Investasi sebesar 68,27 % dari target 15 % atau dengan kata lain Capaian Kinerja sebesar 455%.

Yang dimana merujuk pada Formulasi Penilaian Pertumbuhan Investasi yakni dengan menggunakan rumus CAGR dengan uraian Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Rp) Tahun 2021 Sebesar Rp. 141,323,398,520,- sampai dengan Tahun 2023 Sebesar Rp. 673,290,548,902,-. Sehingga diperoleh capaian Kinerja pada Pertumbuhan Investasi Sebesar 455 %

Tabel III - 13
 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9
 Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja

Indikator Sasaran		Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
				Target	Realisasi	
1	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,63	5,5	7,57	72,66
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	3,06	2,49	2,99	83,28
Rata-rata capaian						77,90

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. GK terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padipadian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan. Garis kemiskinan tahun 2023 Kabupaten Mamuju adalah sebesar 340.795 rupiah meningkat

yang sebelumnya 319.586 rupiah tahun 2022. Kemudian dari tahun 2021 hingga tahun 2023 tumbuh sebesar 18,73 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran kebutuhan masyarakat Kabupaten Mamuju meningkat.

Untuk Indikator Persentase Penduduk Miskin disebutkan bahwa berdasarkan Data Statisisk Kabupaten Mamuju Realisasi Penduduk Miskin sebesar 7,57 % dari target Daerah Kabupaten Mamuju sebesar 5,5 % atau dengan Capaian Kinerja sebesar 72,66 %. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Mamuju tahun 2023 adalah sebesar 68,24 persen yang berarti sekitar 68 dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, masuk dalam pasar tenaga kerja. Dari penduduk usia 15 tahun ke atas, 66,20 persen diantaranya telah bekerja. Ini menunjukkan tingkat penyerapan angkatan kerja di Kabupaten Mamuju sudah cukup tinggi. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Mamuju sebesar, 2,04 persen, dimana dapat terlihat bahwa TPT laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Hal ini berarti penduduk perempuan lebih besar peluangnya untuk terserap dalam lapangan pekerjaan (bekerja).

Untuk penduduk yang termasuk ke dalam golongan bukan angkatan kerja, persentasenya terhadap total penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 31,76 persen. Dari jumlah tersebut, penduduk perempuan lebih besar dibandingkan laki-laki, dikarenakan penduduk perempuan sebagian besar berstatus mengurus rumah tangga, mengikuti kegiatan lainnya seperti bakti sosial, pengajian, pengadaan arisan, dan sejenisnya.

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian Kinerja untuk Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 83,28 %, yang dimana ditargetkan angka Pengangguran Terbuka (TPT) 2,49 % namun realisasi sebesar 2,99 %.

Tabel III - 14
Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10
Meningkatnya kemandirian desa

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
1 Indeks Desa Membangun	Skala	0,653 (Berkembang)	0,645 (Berkembang)	0,660 (Berkembang)	95,06
Rata-rata capaian					95,06

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan

Desa untuk mensejahterakan kehidupan Desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi menyebutkan bahwa Kabupaten Mamuju masuk dalam Kategori Desa Membangun dengan Peringkat Nilai Rata-rata Sebesar 0,6607 dan mendapatkan rangking 324 diantara 434 Kabupaten Kota di Indonesia. Disimpulkan bahwa untuk indikator Indeks Desa Membangun pada kabupaten Mamuju di tahun 2023 memperoleh realisasi Peringkat Nilai Rata-rata Sebesar 0,660 dari target sebesar 0,695 atau dengan kata lain capaian Kinerja sebesar 95,06 %. disebutkan pula bahwa Indeks Desa Membangun saat ini digunakan sebagai salah satu variabel dalam pengalokasian Dana Desa. Hal ini sesuai amanat Undang-Undang untuk mengetahui perkembangan pembangunan setiap desa yang selanjutnya diformulasikan dalam alokasi kinerja maupun alokasi afirmasi kepada Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal.

C. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 terdiri dari 3 (tiga) kelompok, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah. Sedangkan Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah khususnya dalam hal peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Pendapatan Daerah Kabupaten Mamuju terealisasi sebesar
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju

(LAKIP) Tahun 2023

Rp1.196.663.717.480,85 atau 98,37 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.216.452.811.328,00. Hal ini bisa dikatakan sebuah pencapaian yang cukup baik, karena jika berkaca pada capaian realisasi tahun 2022 yaitu sebesar 98,06 persen mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen. Rincian target, realisasi dan capaian pendapatan Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 15
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	116.138.327.293,00	101.272.745.140,85	87,2
2	Pendapatan Transfer	1.051.590.924.035,00	1.046.739.513.501,00	98,54
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48.723.560.000,00	48.651.458.839,00	99,85
Jumlah		1.216.452.811.328,00	1.196.663.717.480,85	98,37

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Pendapatan meliputi 3 komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 terdiri dari Pajak Daerah dengan sebesar Rp30.365.234.539,14 atau 94,73 persen, Retribusi Daerah sebesar Rp8.526.455.409,00 atau 37,57 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp4.233.776.476,00 atau 78,11 persen dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp58.147.278.716,71 atau 103,89 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian target, realisasi dan capaian PAD Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.16
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Daerah	32.053.400.012,00	30.365.234.539,14	94,73
2	Retribusi Daerah	22.695.744.856,00	8.526.455.409,00	37,57
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	5.420.317.494,00	4.233.776.476,00	78,11

	yang Dipisahkan			
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.968.864.931,00	58.147.278.716,71	103,89
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		116.138.327.293,00	101.272.745.140,85	87,2

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Realisasi PAD didukung oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian:

a. Pajak Daerah

Realisasi pajak daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp30.365.234.539,14 atau 94,73 persen. Pajak tahun 2023 ini jika dilihat dari pencapaian menunjukkan adanya penurunan persentase namun mengalami peningkatan nominal. Hal ini menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam hal pemungutan pajak daerah pasca pandemi Covid-19 dan Gempa Bumi 15 Januari 2021 dimana banyak objek pajak yang rusak dan tidak dapat dipungut, namun pada tahun 2023 bisa dikatakan hampir seluruh objek pajak perlahan membaik dan berfungsi kembali walaupun belum 100 persen optimal.

Selengkapnya mengenai rincian target, realisasi dan capaian Pajak Daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 17
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Pajak Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pajak Hotel	2.000.000.000,00	1.701.964.184,14	85,1
2	Pajak Restoran	2.240.455.250,00	2.222.955.175,00	99,22
3	Pajak Hiburan	1.110.544.750,00	652.168.989,00	58,73
4	Pajak Reklame	707.000.000,00	741.025.000,00	104,81
5	Pajak Penerangan Jalan	14.500.000.000,00	14.970.308.359,00	103,24
6	Pajak Parkir	500.000.000,00	216.256.500,00	43,25
7	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	2.090.520,00	1,05
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.515.652.931,00	960.000,00	0,06
9	Pajak Mineral Bukan	1.823.453.441,00	1.687.917.670,00	92,57

	Logam dan Batuan			
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.754.937.640,00	2.626.887.350,00	95,35
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	4.701.356.000,00	5.542.700.792,00	117,9
Jumlah		32.053.400.012,00	30.365.234.539,14	94,73

Sumber Data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2023

b. Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2023 sebesar Rp8.526.455.409,00 atau 37,57 persen dari target Rp22.695.744.856,00 yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Kendala dalam merealisasikan retribusi tahun 2023 ini tidak jauh berbeda dengan pajak daerah.

Rincian target, realisasi dan capaian retribusi daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 18

Rincian Target, Realisasi dan Capaian Retribusi Daerah Kabupaten Mamuju 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Retribusi Jasa Umum			
a.	Retribusi Pelayanan Kesehatan Kesehatan	7.900.000.000,00	5.710.602.300,00	72,29
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan	4.058.000.000,00	1.261.370.000,00	31,08
c.	Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan	2.759.000.000,00	169.018.400,00	6,13
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	900.000.000,00	359.383.000,00	39,93
2	Retribusi Jasa Usaha			
a.	Retribusi	459.650.000,00	57.650.000,00	12,54

		Pemakaian Kekayaan Daerah			
	b.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.000.000.000,00	0	0
	c.	Retribusi Rumah Potong Hewan	535.800.000,00	18.000.000,00	3,36
	d.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.000.000.000,00	101.300.001,00	10,13
3	Retribusi Perizinan Tertentu				
	a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.843.294.856,00	849.131.708,00	22,09
	b.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	240.000.000,00	0	0
Jumlah Retribusi Daerah			22.695.744.856,00	8.526.455.409,00	37,57

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp4.233.776.476,00 atau 78,11 persen. Pendapatan ini merupakan deviden atau bagian laba yang diterima dari penyertaan modal kepada Bank Sulselbar.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2023 sebesar Rp58.147.278.716,71 atau 103,89persen dari target. Realisasi Lain-lain PAD ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dan secara persentase bisa dikatakan capaian yang baik yaitu melebihi target yang ditetapkan. Kendala dalam realisasi ini sama seperti pada pemungutan pajak dan retribusi daerah. Rincian Lain-lain PAD yang sah disajikan pada tabel berikut:

Tabel III. 19
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Lain-lain PAD yang Sah
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	1.631.710.369,00	681.459.998,00	41,76
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	476.750.000,00	215.000.000,00	45,1
3	Jasa Giro	2.008.583.490,00	2.409.205.094,73	119,95
3	Pendapatan Bunga	0	43.189.829,00	-
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0	173.642.197,00	-
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	500.416.847,00	452.436.882,24	90,41
6	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.000.000,00	0	0
6	Pendapatan dari Pengembalian	3.946.881.800,00	5.045.520.858,74	127,84
7	Pendapatan BLUD	30.000.000.000,00	32.336.380.415,00	107,79
8	Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	17.390.522.425,00	16.790.443.442,00	96,55
Jumlah		55.968.864.931,00	58.147.278.716,71	103,89

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2023

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar Rp1.046.739.513.501,00 atau 99,54 persen dari target yang telah ditetapkan. Rincian Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel III.20
Rincian Target, Realisasi dan Capaian Dana Perimbangan
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2023

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak				
	a.	Bagi Hasil Pajak			
	1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.880.443.000,00	2.677.203.943,00	142,37
	2	DBH PPh Pasal 21	6.923.604.000,00	7.550.562.386,00	109,06
	3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0	90.374.101,00	77,57
Jumlah Bagi Hasil Pajak			8.804.047.000,00	10.318.140.430,00	117,2
	b.	Bagi Hasil Bukan Pajak			
	1	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	79.534.000,00	68.913.847,00	86,65
	2	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0	32.960.460,00	-
	3	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	5.432.056.000,00	5.208.108.957,00	95,88
	4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	4.215.883.000,00	4.427.636.211,00	105,02
Jumlah Bagi			9.727.473.000,00	9.737.619.475,00	100,1

Hasil Bukan Pajak				
2	Dana Alokasi Umum	617.405.396.000,00	621.340.591.953,00	100,64
3	Dana Alokasi Khusus	261.581.867.000,00	256.545.824.857,00	98,07
4	Dana Insentif Daerah	10.176.284.000,00	10.176.284.000,00	100
5	Dana Desa	85.572.902.000,00	85.572.902.000,00	100
6	Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi	48.682.955.035,00	46.628.150.786,00	95,78
7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	9.640.000.000,00	6.420.000.000,00	66,6
Jumlah Pendapatan Transfer		1.051.590.924.035,00	1.046.739.513.501,00	99,54

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2023 sebesar Rp48.651.458.839,00 atau 99,85 persen dari target yang telah ditetapkan. Secara rinci, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ini berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat senilai Rp3.767.000.000,00 untuk digunakan sebagai pembiayaan pembangunan sarana air minum pedesaan dan Pendapatan lainnya senilai Rp44.884.458.839,00 yang merupakan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju.

a. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Kabupaten Mamuju sebesar Rp1.164.158.456.520,00 atau tercapai 91,73 persen. Secara ringkas, Belanja dan Transfer dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III. 21
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Operasi				
1	Belanja Pegawai	452.078.055.030,00	424.150.602.261,00	93,82
2	Belanja Barang Jasa	340.201.557.570,00	321.713.121.321,00	94,57
3	Belanja Hibah	38.875.335.786,00	21.937.785.972,00	56,43

Jumlah Belanja Operasi		831.154.948.386,00	767.801.509.554,00	92,38
Belanja Modal				
1	Belanja Modal Tanah	508.361.248,00	108.925.000,00	21,43
2	Belanja Modal Peralatan Mesin	63.917.026.815,00	60.351.283.235,00	94,42
3	Belanja Modal Gedung Bangunan	129.871.509.435,00	111.326.417.318,00	85,72
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi Jaringan	83.212.871.898,00	66.168.909.423,00	79,52
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.278.014.050,00	5.567.898.050,00	105,49
6	Belanja Modal Aset Lainnya	147.600.000,00	147.180.908,00	99,72
Jumlah Belanja Modal		282.935.383.446,00	243.670.613.934,00	86,12
Belanja Tak Terduga				
1	Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	41.258.973,00	8,25
Jumlah Belanja Tak Terduga		500.000.000,00	41.258.973,00	8,25
Transfer Bantuan Keuangan				
1	Bagi Hasil	5.846.331.012,00	3.959.920.458,00	67,73
2	Bantuan Keuangan	148.733.636.540,00	148.685.153.601,00	99,97
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		154.579.967.552,00	152.645.074.059,00	98,75
Jumlah Belanja dan Transfer Daerah		1.269.170.299.384,00	1.164.158.456.520,00	91,73

Sumber data: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2023

Serapan realisasi belanja dan transfer tahun anggaran 2023 ini mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 93,37 persen, namun angka realisasi menunjukkan peningkatan sebesar 6,03 persen. Hal ini disebabkan karena anggaran belanja dan transfer yang memang meningkat dari tahun sebelumnya sehingga Pemerintah Kabupaten Mamuju dapat memaksimalkan belanja untuk kebutuhan operasional dan investasi daerah.

Jika memperhatikan setiap Jenis belanja, serapan realisasi bisa dikatakan cukup maksimal yang berada diatas angka 75 persen, kecuali beberapa jenis belanja tertentu yang masih rendah disebabkan karena berbagai kendala dalam proses pelaksanaannya.

Adapun jenis belanja yang dianggap rendah realisasinya yaitu:

- i. Belanja Hibah yang hanya sebesar 56,43 persen yang sebagian penganggarnya untuk hibah pelaksanaan pilkada 2024 ke KPU dan Bawaslu tidak bisa direalisasikan sepenuhnya karena kendala ketersediaan dana (kas) serta belum dilaksanakan kesepakatan berupa penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan Bawaslu.
 - ii. Belanja Modal Tanah hanya sebesar 21,43 persen yang sebagian besar untuk pensertifikatan tanah milik pemda belum bisa dilaksanakan karena berbagai kendala dalam proses penerbitan sertifikat atas tanah tersebut.
 - iii. Belanja Tak Terduga yang dianggarkan namun diharapkan untuk tidak digunakan hanya terealisasi sebesar 8,23 persen.
 - iv. Belanja Bagi Hasil yang merupakan penganggaran bagi hasil atas pajak dan retribusi daerah ke Pemerintah Desa hanya terealisasi sebesar 67,73 persen tidak maksimal karena mengikuti realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah yang tidak terealisasi maksimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- b. Realisasi Pembiayaan

Pembiayaan netto tahun 2023 sebesar Rp52.717.488.056,00 bersumber dari penerimaan pembiayaan berupa penggunaan Silpa tahun sebelumnya Rp56.717.488.056,00 dan pengeluaran pembiayaan senilai Rp4.000.000.000,00. Dan dari hasil tersebut, setelah memperhitungkan surplus dari pendapatan terhadap belanja, terdapat Sisa Lebih Penggunaan anggaran (SiLPA) sebesar Rp85.222.749.016,85 yang akan digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan pada Tahun Anggaran 2024.

Pengelolaan pembiayaan daerah yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut

:

Tabel III. 22
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023

No	Uraian		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penerimaan Pembiayaan				
	a.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	56.717.488.056,00	56.717.488.056,00	100
Jumlah Penerimaan Pembiayaan			56.717.488.056,00	56.717.488.056,00	100
2	Pengeluaran Pembiayaan				
	a.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan			4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100
Jumlah Pembiayaan Daerah Neto			52.717.488.056,00	52.717.488.056,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)			0	85.222.749.016,85	

Sumber Data : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah, 2023

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan dan Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), yang tersusun ini merupakan media pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Mamuju selama Tahun 2023, Media ini juga dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi dan refleksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dimasa-masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) merupakan gambaran Kinerja Daerah ditahun 2023, termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan selama Tahun berjalan. Di samping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan.

Sebagai penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Mamuju Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Mamuju telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian Pengukuran Kinerja terhadap 10 (Sepuluh) Sasaran Strategis dan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama, diketahui bahwa 7 indikator sasaran atau 31,81 persen bermakna Baik Sekali, 11 indikator sasaran atau 50,00 persen bermakna Baik, 2 indikator sasaran atau 9,09 persen bermakna Cukup dan 2 indikator sasaran atau 9,09 persen Bermakna Kurang. Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 107,63 persen. yang dimana hal tersebut tercipta disebabkan adanya salah satu Indikator yang mencapai jauh melebihi daripada target daerah yakni terdapat pada Indikator sasaran Pertumbuhan Investasi dengan capaian sebesar 455,00 Persen.

B. Strategi peningkatan kinerja

Adapun rekomendasi Langkah-langkah perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Mamuju kedepan adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan rencana aksi Sakjip Pemkab. Mamuju di seluruh unsur baik pada perencanaan kinerja - pengukuran kinerja - pelaporan kinerja - evaluasi akuntabilitas kinerja internal
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan rencana aksi yang dilaksanakan pemerintah Daerah agar mendapatkan poin poin perbaikan sesuai kondisi yang diharapkan.
3. Mengembangkan Kebijakan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) agar penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Masyarakat dapat terwujud di pemerintah Kabupaten Mamuju.

Demikian rekomendasi perbaikan kinerja kabupaten Mamuju untuk peningkatan kinerja pemerintahan Kabupaten Mamuju kedepannya.



PEMERINTAH KABUPATENMAMUJU
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Ahmad Kirang No 39. Mamuju (Kode Pos) 91511 Sulawesi Barat
E-mail : inspektoratkabmamuju@gmail.com. Web : inspektoratkabmamuju.com
Telp./Fax (0426) 21350

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas pada laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini walaupun masih diperlukan adanya perbaikan untuk meningkatkan keandalannya.

Mamuju, 25 Maret 2023
Inspektur Daerah



MUHAMMAD YANI, S.H., M.Si., CGCAE
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710915 199903 1 007

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN MAMUJU**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	CC	75
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	100
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	rendah	50
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90	78,75	87,50
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	60	97	161
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	60	80	133
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	80	77,64	97
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,50	71,07	103
	Indeks Pendidikan	Skala	0,36	0,64	177
	Indeks Kesehatan	Skala	0,556	0,748	134
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	24.000	10.075	42
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,58	60,59	101
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	60	53	88
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100	99,57	99
	Indeks Kriminilitas	Persen	100	,99,57	99
Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Persen	0,28	0,37	75
	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.5-5.6%	4,37	78
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	68,27	455
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,5	7,57	72
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,49	2,99	83
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,695 (Berkembang)	0,660 (Berkembang)	95

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

Jabatan : BUPATI MAMUJU

Berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Mamuju, Maret 2024

BUPATI MAMUJU,

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KABUPATEN MAMUJU**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	BAIK
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	70
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	70
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	80
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Sedang
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,70
	Indeks Pendidikan	Skala	0,42
	Indeks Kesehatan	Skala	0,578
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	32,500
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,87
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	65
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100
	Indeks Kriminilitas	Persen	100
Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Persen	0,25
	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.6-5.7%
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,27
Meningkatnya kemandirian deFsa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,698 (Berkembang)

BUPATI MAMUJU,



HI. SITI SUTINAH SUHARDI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN TA 2023	REALISASI TA 2023	(%)	REALISASI TA 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.a				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.a.1)	32.053.400.012,00	30.365.234.539,14	94,73	27.051.566.275,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.a.2)	22.695.744.856,00	8.526.455.409,00	37,57	6.281.331.842,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.a.3)	5.420.317.494,00	4.233.776.476,00	78,11	4.278.586.226,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah	5.1.1.a.4)	55.968.864.931,00	58.166.039.891,71	103,93	38.283.481.036,88
7	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) (3 s/d 6)		116.138.327.293,00	101.291.506.315,85	87,22	75.894.965.379,88
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.b				
9	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.b.1)				
10	Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.1)a)	8.804.047.000,00	10.318.140.430,00	117,20	15.090.695.529,00
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	5.1.1.b.1)b)	9.727.473.000,00	9.737.619.475,00	100,10	2.501.387.515,00
12	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.b.1)c)	617.405.396.000,00	621.340.591.953,00	100,64	591.973.896.010,00
13	Dana Alokasi Khusus (DAK)	5.1.1.b.1)d)	261.581.867.000,00	256.545.824.857,00	98,07	190.949.177.798,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (10 s/d 13)		897.518.783.000,00	897.942.176.715,00	100,05	800.515.156.852,00
15	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	5.1.1.b.2)				
16	Dana Insentif Daerah (DID)		10.176.284.000,00	10.176.284.000,00	100,00	20.428.056.000,00
17	Dana Desa		85.572.902.000,00	85.572.902.000,00	100,00	75.523.424.200,00
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 17)		95.749.186.000,00	95.749.186.000,00	100,00	95.951.480.200,00
19	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	5.1.1.b.3)				
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.b.3)a)	48.682.955.035,00	46.628.150.786,00	95,78	44.031.581.291,00
21	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (20)		48.682.955.035,00	46.628.150.786,00	95,78	44.031.581.291,00
22	Bantuan Keuangan	5.1.1.b.4)				
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	5.1.1.b.4)a)	9.640.000.000,00	6.420.000.000,00	66,60	18.503.062.400,00
24	Jumlah Bantuan Keuangan (23)		9.640.000.000,00	6.420.000.000,00	66,60	18.503.062.400,00
25	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER (14 + 18 +21 + 24)		1.051.590.924.035,00	1.046.739.513.501,00	99,54	959.001.280.743,00
26	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.c				
27	Pendapatan Hibah	5.1.1.c.1)	3.842.000.000,00	3.767.000.000,00	98,05	1.708.000.000,00
28	Pendapatan Lainnya	5.1.1.c.2)	44.881.560.000,00	44.884.458.839,00	100,01	39.650.788.853,00
29	Jumlah LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH (27 s/d 28)		48.723.560.000,00	48.651.458.839,00	99,85	41.358.788.853,00
30	TOTAL PENDAPATAN (7 + 25 +29)		1.216.452.811.328,00	1.196.682.478.655,85	98,37	1.076.255.034.975,88
31	BELANJA	5.1.2				
32	BELANJA OPERASI	5.1.2.a				
33	Belanja Pegawai	5.1.2.a.1)	452.078.055.030,00	424.150.602.261,00	93,82	421.016.707.358,69
34	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.a.2)	340.201.557.570,00	321.692.621.321,00	94,56	314.644.292.766,58
35	Belanja Hibah	5.1.2.a.3)	38.875.335.786,00	21.937.785.972,00	56,43	13.202.812.837,00
36	JUMLAH BELANJA OPERASI (33 s/d 36)		831.154.948.386,00	767.781.009.554,00	92,38	748.863.812.962,27
37	BELANJA MODAL	5.1.2.b				
38	Belanja Modal Tanah	5.1.2.b.1)	508.361.248,00	108.925.000,00	21,43	284.384.740,00
39	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.b.2)	63.917.025.815,00	60.370.283.235,00	94,45	47.931.270.557,00
40	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.b.3)	129.871.509.435,00	111.326.417.318,00	85,72	76.161.116.859,00
41	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.b.4)	83.212.871.898,00	66.168.909.423,00	79,52	79.425.537.435,00
42	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.b.5)	5.278.014.050,00	5.569.398.050,00	105,52	5.748.167.149,00
43	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.b.6)	147.600.000,00	147.180.908,00	99,72	-
44	JUMLAH BELANJA MODAL (39 s/d 43)		282.935.383.446,00	243.691.113.934,00	86,13	209.550.476.740,00
45	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.c				
46	Belanja Tak Terduga	5.1.2.c	500.000.000,00	41.258.973,00	8,25	323.527.897,00
47	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA (46)		500.000.000,00	41.258.973,00	8,25	323.527.897,00
48	TOTAL BELANJA (37 + 44 +47)		1.114.590.331.832,00	1.011.513.382.461,00	90,75	958.737.817.599,27
49	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.2.d				
50	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.d.1)	5.846.331.012,00	3.959.920.458,00	67,73	2.784.133.154,00
51	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.d.2)	148.733.636.540,00	148.685.153.601,00	99,97	136.416.040.919,00
52	JUMLAH TRANSFER BANTUAN KEUANGAN (50 s/d 51)		154.579.967.552,00	152.645.074.059,00	98,75	139.200.174.073,00
53	TOTAL TRANSFER (51)		154.579.967.552,00	152.645.074.059,00	98,75	139.200.174.073,00
54	TOTAL BELANJA DAN TRANSFER (48 + 53)		1.269.170.299.384,00	1.164.158.456.520,00	91,73	1.097.937.991.672,27
55	SURPLUS / (DEFISIT) (30 -54)	5.1.3	- 52.717.488.056,00	32.524.022.135,85	(61,69)	- 21.682.956.696,39
56	PEMBIAYAAN					
57	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4				
58	Penggunaan SILPA	5.1.4.a	56.717.488.056,00	56.717.488.058,14	100,00	78.400.444.754,53
59	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (58)		56.717.488.056,00	56.717.488.058,14	100,00	78.400.444.754,53
60	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5				
61	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (61)		4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	-
62	PEMBIAYAAN NETTO (59 - 62)	5.1.6	52.717.488.056,00	52.717.488.058,14	100,00	78.400.444.754,53
63	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (55 + 63)	5.1.7	-	85.241.510.193,99		56.717.488.058,14

Mamuju, Maret 2024
Bupati Mamuju,

HJ. SITTI SUTINAH SUHARDI, S.H., M.SI

"Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini"

Penjabaran Program Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik																
Menciptakan pemerintahan Kabupaten Mamuju yang baik dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	C	CC	210.093.5 24.365	B	215.347.0 03.322	B	220.712.5 06.253	BB	226.207.9 92.375	A	234.126.5 03.778	A	1.106.487. 530.093	
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	161.213.7 30.314	Baik	165.244.0 73.574	Baik	169.375.1 75.410	Baik	173.609.5 54.795	Baik	177.949.7 93.669	Baik	847.392.3 27.762	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda APBD/P sesuai dengan Ketentuan	Persen	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Persen	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase SP2D yang Terbit sesuai Ketentuan	Persen	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban sesuai ketentuan	Persen	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Penyampaian Laporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan	Persen	100	100	31.761.44 0.701	100	32.555.47 6.719	100	33.369.36 3.636	100	34.203.59 7.727	100	35.058.68 7.671	100	166.948.5 66.454	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Peningkatan Tertib Administrasi Penatausahaan Barang Milik Daerah	Persen	85	85	1.189.496.389	85	1.219.233.799	85	1.249.714.644	85	1.280.957.510	85	1.312.981.448	85	6.252.383.790	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase PAD terhadap Pendapatan	Persen	7.04	7.04	608.515.210	7.04	623.728.090	7.04	639.321.293	7.04	655.304.325	7.04	671.686.933	7.04	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran Pad Dalam Apbd	Persen	(0.87)	(0.87)	608.515.210	(0.87)	623.728.090	(0.87)	639.321.293	(0.87)	655.304.325	(0.87)	671.686.933	(0.87)	3.198.555.851	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
	Nilai LPPD	Skor	Tinggi	Sangat Tinggi	34.666.090.159	Sangat Tinggi	35.533.883.257	Sangat Tinggi	36.403.380.067	Sangat Tinggi	37.291.833.112	Sangat Tinggi	38.275.794.622	Sangat Tinggi	182.170.981.217		
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Perencanaan Perangkat Daerah	Persen	100	100	633.162.495	100	661.353.263	100	670.367.647	100	676.937.250	100	757.080.363	100	3.398.901.018	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	Persen	100	100	259.777.250	100	262.323.067	100	264.893.833	100	267.489.793	100	270.111.193	100	1.324.595.136	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam yang tercapai	Persen	100	100	233.364.200	100	235.651.169	100	237.960.551	100	240.292.564	100	242.647.431	100	1.189.915.915	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	Persen	100	100	245.073.104	100	247.474.820	100	249.900.074	100	252.349.094	100	254.822.115	100	1.249.619.207	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Rasio	8.15	9	32.000.000	9.95	32.800.000	10	33.620.000	10	34.460.500	10	35.322.013	10	168.202.513	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan Berbangsa dan Bermegara untuk kepentingan Negara	Rasio	N/A	50	50.000.000	70	51.250.000	80	52.531.250	90	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Tingkat kesesuaian perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Persen	70	70	37.327.000	80	38.260.175	90	39.216.679	90	40.197.096	100	41.202.024	100	196.202.974	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Hasil Penilaian DPRD terhadap Pelayanan Fasilitas Tugas dan Fungsi DPRD	Predikat	Memuaskan	Memuaskan	27.472.886.110	Memuaskan	28.159.708.263	Memuaskan	28.863.700.969	Memuaskan	29.585.293.494	Memuaskan	30.324.925.831	Memuaskan	144.406.514.667	SEKRETARIAT DPRD	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persen	80	83	402.500.000	85	412.562.500	90	422.876.563	95	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Audit dengan Tujuan tertentu	Persen	100	100	402.500.000	100	412.562.500	100	422.876.563	100	433.448.477	100	444.284.688	100	2.115.672.228	INSPEKTORAT DAERAH	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Presentase Obyek Pengawasan yang diawasi	Persen	100	100	345.000.000	100	353.625.000	100	362.465.625	100	371.527.266	100	380.815.447	100	1.813.433.338	INSPEKTORAT DAERAH	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Presentase Zona Integritas, Presentase PMPRB OPD dan Asistensi Desa, Presentase Pejabat/ASN yang melaporkan LHKPN/LHKSN	Persen	100	100	400.000.000	100	410.000.000	100	420.250.000	100	430.756.250	100	441.525.156	100	2.102.531.406	INSPEKTORAT DAERAH	

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase (%) Keterpenuhan Formasi ASN	Persen	35.6	2.0	1.622.500.000	2.1	1.663.062.500	1.9	1.704.639.063	2.3	1.747.255.039	2.0	1.790.936.415	2.0	8.528.393.017	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase (%) ASN Yang Meningkatkan Kompetensinya	Persen	6.2	11.0	2.530.000.000	11.0	2.593.250.000	11.0	2.658.081.250	11.0	2.724.533.281	11.0	2.792.646.613	11.0	13.298.511.144	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Skor	80	90	14.213.703.892	90	14.569.046.491	90	14.933.950.776	90	15.306.604.468	90	17.900.915.487	90	76.924.221.114	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan otonomi	Persen	100	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	200.000.000	100	822.877.344	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spritual, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana	Persen	100	100	5.025.113.000	100	5.150.740.825	100	5.279.509.346	100	5.411.497.079	100	7.357.267.943	100	28.224.128.193	SEKRETARIAT DAERAH
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana	Persen	100	100	522.894.882	100	535.967.254	100	549.366.435	100	563.100.596	100	765.570.397	100	2.936.899.564	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang kerjasama daerah yang terlaksana	Persen	100	100	495.000.000	100	507.375.000	100	520.059.375	100	533.060.859	100	724.729.500	100	2.780.224.734	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang penyusunan program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana	Persen	100	100	314.543.998	100	322.407.598	100	330.467.788	100	338.729.483	100	347.197.720	100	1.653.346.587	SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian yang terlaksana	Persen	100	100	158.272.950	100	162.229.774	100	166.285.518	100	170.442.656	100	174.703.722	100	831.934.620	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana	Persen	100	100	814.225.998	100	834.581.648	100	855.446.189	100	876.832.344	100	898.753.152	100	4.279.839.331	SEKRETARIAT DAERAH
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang SDA (Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertambangan dan Lingkungan Hidup serta Energi dan Air yang terlaksana	Persen	100	100	193.686.900	100	198.529.073	100	203.492.299	100	208.579.607	100	213.794.097	100	1.018.081.976	SEKRETARIAT DAERAH
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas	Persen	91	100	683.038.500	100	700.114.463	100	717.617.324	100	735.557.757	100	753.946.701	100	3.590.274.745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi	Persen	100	100	683.038.500	100	700.114.463	100	717.617.324	100	735.557.757	100	753.946.701	100	3.590.274.745	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE	Persen	31	67	2.983.797.600	78	3.058.392.540	89	3.134.852.354	100	3.213.223.662	100	3.293.554.254	100	15.683.820.410	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Persen	N/A	50	500.000.000	75	512.500.000	100	525.312.500	100	538.445.313	100	551.906.445	100	2.628.164.258	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	Persen	N/A	31	184.501.115	44	189.113.643	56	193.841.484	67	198.687.521	89	203.654.709	89	969.798.472	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Persen	100	100	715.000.000	100	732.875.000	100	751.875.000	100	769.976.797	100	789.226.217	100	3.758.953.014	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Persen	100	100	443.000.000	100	454.075.000	100	465.426.875	100	477.062.547	100	488.989.111	100	2.328.553.533	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Layanan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	100	100	313.056.522	100	320.882.935	100	328.905.008	100	337.127.634	100	345.555.824	100	1.645.527.923	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Ketersediaan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persen	100	100	34.533.927	100	35.397.275	100	36.282.207	100	37.189.262	100	38.118.994	100	181.521.665	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik yang Berkelanjutan																	
Meningkatnya Infrastruktur Pendukung Kegiatan Ekonomi Sosial yang Berkeadilan dan Memperhatikan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	N/A	50	167.359.411.907	60	171.573.397.206	70	176.237.732.134	80	180.643.675.442	90	185.159.767.328	90	880.973.984.017		

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	N/A	50	149.552.0 17.546	60	153.320.8 17.986	70	157.528.8 38.434	80	161.467.0 59.397	90	165.503.7 35.883	90	787.372.4 69.246		
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	persen	N/A	60	5.014.906.655	63	5.140.279.321	66	5.268.786.304	69	5.400.505.962	73	5.535.518.611	73	26.359.996.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas daerah irigasi yang dilayani oleh jaringan irigasi	persen	N/A	60	5.014.906.655	63	5.140.279.321	66	5.268.786.304	69	5.400.505.962	73	5.535.518.611	73	26.359.996.853	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	persen	73.1	82.1	7.786.707.311	86.6	7.981.374.994	91.1	8.180.909.369	95.6	8.385.432.103	100	8.595.067.906	100	40.929.491.683	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	persen	N/A	N/A	0	30	1.000.000.000	35	1.090.000.000	40	1.180.000.000	45	1.280.000.000	45	4.550.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	persen	60	70	2.629.974.900	75	2.695.724.273	80	2.763.117.379	85	2.832.195.314	90	2.903.000.197	90	13.824.012.063	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	persen	21.49	27.49	1.328.925.100	30.49	1.362.148.228	33.49	1.396.201.933	36.49	1.431.106.982	39.49	1.466.884.656	39.49	6.985.266.899	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan permukiman kondisi baik	persen	30	44	6.643.155.225	50	6.809.234.106	56	6.979.464.958	62	7.153.951.582	68	7.332.800.372	68	34.918.606.243	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio Kepatuhan PBG Kab/Kota	persen	24.30	26.10	18.789.537.550	27.10	19.259.275.989	28.10	19.740.757.889	19.10	20.234.276.836	30.10	20.740.133.757	30.10	98.763.982.021	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan sesuai dengan pemanfaatan ruang dan lingkungan	persen	10.30	39.90	240.300.000	53.90	246.307.500	68.80	252.465.188	83.70	258.776.817	98.60	265.246.238	98.60	1.263.095.743	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kab/Kota (IKK Outcome)	persen	48.72	54.72	80.000.000.000	57.72	81.000.000.000	60.72	82.960.000.000	63.72	84.971.250.000	66.72	87.025.031.250	66.72	415.956.281.250	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	persen	10	20	191.604.150	25	196.394.254	30	201.304.110	35	206.336.713	40	211.495.131	40	1.007.134.358	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketersediaan dokumen rencana tata ruang	persen	9	9	900.000.000	18	922.500.000	27	1.320.562.500	36	1.353.576.563	45	1.387.415.977	45	5.884.055.040	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	persen	100	100	11.400.000.000	100	11.685.000.000	100	11.977.125.000	100	12.276.553.125	100	12.583.466.953	100	59.922.145.078	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas Kawasan Permukiman Kumuh	Ha	49.84	49.64	930.000.000	49.49	953.250.000	49.35	977.081.250	49.22	1.001.508.281	49.10	1.026.545.988	246.8	4.888.385.519	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Luas Permukiman yang tertata	persen	10.13	14.89	1.550.000.000	14.85	1.588.750.000	15.79	1.628.468.750	16.24	1.669.180.469	16.69	1.710.909.980	78.46	8.147.309.199	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU	persen	78	80	3.500.000.000	80	3.587.500.000	80	3.677.187.500	80	3.769.117.188	80	3.863.345.117	80	18.397.149.805	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengembang Perumahan kemampuan kecil yg bersertifikasi	persen	N/A	30	10.000.00 0	40	10.250.00 0	45	10.506.25 0	50	10.768.90 6	55	11.038.12 9	55	52.563.28 5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Tersedianya Lokasi Pembangunan dalam rangka Penanaman Modal	hektar	N/A	45	22.000.00 0	50	22.550.00 0	55	23.113.75 0	60	23.691.59 4	65	24.283.88 4	65	115.639.2 28	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penanganan sengketa tanah garapan	persen	N/A	100	25.000.00 0	100	25.625.00 0	100	26.265.62 5	100	26.922.26 6	100	27.595.32 2	100	131.408.2 13	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	hektar	85	86	3.250.000. 000	87	3.331.250. 000	88	3.414.531. 250	89	3.499.894. 531	90	3.587.391. 895	90	17.083.06 7.676	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Persen	N/A	87	75.000.000	88	76.875.000	89	78.796.875	90	80.766.797	91	82.785.967	91	394.224.639	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Tersedianya tanah untuk masyarakat	persen	N/A	N/A	0	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	124.575.469	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi yang dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	100	100	250.000.000	100	256.250.000	100	262.656.250	100	269.222.656	100	275.953.223	100	1.314.082.129	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Persen	N/A	80	13.897.394.361	80	14.244.829.220	80	14.600.949.950	80,5	14.965.973.701	80,6	15.340.123.043	80,6	73.049.270.275	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penyusunan dokumen perencanaan lingkungan hidup	persen	100	100	257.567.000	100	264.006.175	100	270.606.329	100	277.371.488	100	284.305.775	100	1.353.856.767	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Jumlah Sumber Pencemar Berkurang	persen	N/A	50	205.000.000	55	210.125.000	60	215.378.125	65	220.762.578	70	226.281.643	70	1.077.547.346	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau Tercapai	persen	0.01	0.01	4.860.000.000	0.01	4.981.500.000	0.01	5.106.037.500	0.01	5.233.688.438	0.01	5.364.530.648	0.01	25.545.756.586	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usagha / Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang melakukan Pengelolaan Limbah B3	persen	N/A	100	125.000.000	100	128.125.000	100	131.328.125	100	134.611.328	100	137.976.611	100	657.041.064	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	82	150.000.000	84	153.750.000	86	157.593.750	88	161.533.594	90	165.571.934	90	788.449.278	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	persen	N/A	100	50.000.000	100	51.250.000	100	52.531.250	100	53.844.531	100	55.190.645	100	262.816.426	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Terfasilitasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	persen	N/A	100	30.000.000	100	30.750.000	100	31.518.750	100	32.306.719	100	33.114.387	100	157.689.856	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	persen	N/A	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	persen	74	73	8.169.827.361	72	8.374.073.045	71	8.583.424.871	70	8.798.010.493	72	9.017.960.755	72	42.943.296.525	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	3.910.000.000	Tinggi	4.007.750.000	Sedang	4.107.943.750	Sedang	4.210.642.344	Sedang	4.315.908.402	Sedang	20.552.244.496	
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	Persen	50	55	3.910.000.000	60	4.007.750.000	65	4.107.943.750	70	4.210.642.344	80	4.315.908.402	80	20.552.244.496	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial.																
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	68,15	68,35	320.217.652.766	68,5	328.299.499.083	68,7	336.380.891.557	68,85	344.766.812.850	69,05	353.362.394.324	69,05	1.683.027.250.580	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pendidikan	Skala	0,26	0,3	129.081.4 60.311	0,36	132.384.9 01.817	0,42	135.568.4 29.361	0,5	138.934.0 45.099	0,55	142.383.8 01.223	0,55	678.352.6 37.811	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan sesuai Standar Nasional Pendidikan	Persen	48.30	50.72	105.038.4 35.535	53.25	107.664.3 96.423	55.91	110.356.0 06.334	58.71	113.114.9 06.492	61.64	115.942.7 79.155	61.64	552.116.5 23.939	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal yang Disusun Sesuai Standar	Paket	2500 Paket	3000 Paket	82.500.00 0	3500 Paket	84.562.50 0	4000 Paket	86.676.56 3	4500 Paket	88.843.47 7	5000 Paket	91.064.56 3	20.000 Paket	433.647.1 03	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Murid	Rasio	1:20 Rasio	1:20 Rasio	16.819.26 4.088	1:20 Rasio	17.339.74 5.690	1:20 Rasio	17.670.73 9.332	1:20 Rasio	18.112.50 7.816	1:20 Rasio	18.565.32 0.511	1:20 Rasio	88.507.57 7.437	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan Dasar, Menengah, PAUD dan NonFormal yang Terkreditasi Minimal B	Persen	63.39	63.89	150.000.0 00	64.39	153.750.0 00	64.89	157.593.7 50	65.39	161.533.5 94	65.89	165.571.9 34	65.89	788.449.2 78	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang berpartisipasi dalam ekonomi mandiri	Persen	12.32	12.82 Persen	857.999.9 98	13.32 Persen	879.449.9 98	13.82 Persen	901.436.2 48	14.32 Persen	923.972.1 54	14.82 Persen	947.071.4 58	14.82 Persen	4.509.929. 856	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah prestasi olahraga	Prestasi	4 Prestasi	5 Prestasi	447.700.0 00	6 Prestasi	458.892.5 00	7 Prestasi	470.364.8 12	8 Prestasi	482.123.9 33	8 Prestasi	494.177.0 31	34 Prestasi	2.353.258. 276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet berprestasi	Orang	6 Orang	7 Orang	447.700.0 00	8 Orang	458.892.5 00	9 Orang	470.364.8 12	10 Orang	482.123.9 33	10 Orang	494.177.0 31	44 Orang	2.353.258. 276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	Persen	50.75	51.25 Persen	447.700.000	51.75 Persen	458.892.500	52.25 Persen	470.364.812	52.75 Persen	482.123.933	53.25 Persen	494.177.031	53.25 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pelatih yang bersertifikat	Persen	38.87	39.37 Persen	447.700.000	39.87 Persen	458.892.500	40.37 Persen	470.364.812	40.87 Persen	482.123.933	41.37 Persen	494.177.031	41.37 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase sarpras olahraga yang layak	Persen	0.05	0.06 Persen	447.700.000	0.07 Persen	458.892.500	0.07 Persen	470.364.812	0.08 Persen	482.123.933	0.08 Persen	494.177.031	0.08 Persen	2.353.258.276	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepramukaan	Orang	0 Orang	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	943.799.998	100 Orang	4.718.999.990	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:18 Rasio	1:18 Rasio	712.740.173	1:17 Rasio	730.558.677	1:16 Rasio	748.822.644	1:15 Rasio	767.543.210	1:14 Rasio	786.731.790	1:14 Rasio	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Dengan Penduduk	persen	1:20.000 Rasio	1:20.000 Rasio	712.740.173	1:19.000 Rasio	730.558.677	1:18.000 Rasio	748.822.644	1:17.000 Rasio	767.543.210	1:16.000 Rasio	786.731.790	1:16.000 Rasio	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	orang	0.21	0.21	712.740.173	0.21	730.558.677	0.21	748.822.644	0.21	767.543.210	0.21	786.731.790	0.21	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	prestasi	10	10	712.740.173	11	730.558.677	12	748.822.644	13	767.543.210	14	786.731.790	14	3.746.396.494	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Regulasi Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno yang ditetapkan	orang	100	100	100.000.000	100	102.500.000	100	105.062.500	100	107.689.063	100	110.381.289	100 Persen	525.632.852	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Indeks Kesehatan	Skala	0,508	0,522	181.292.086.187	0,556	185.824.388.341	0,578	190.469.998.049	0,612	195.231.747.998	0,632	200.112.541.702	0,632	952.930.762.277	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Penyediaan Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan	Persen	8.3	100	133.618.065.166	100	136.958.641.796	100	140.382.732.840	100	143.892.426.161	100	147.489.861.815	100	702.341.727.778	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas yang sesuai standar	Persen	100	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	5.000.000	100	25.000.000	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	Persen	100	100	36.932.424.796	100	37.855.735.416	100	38.802.128.801	100	39.772.182.021	100	40.766.486.572	100	194.128.957.606	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang Kompeten	Jumlah	25	30	1.942.974.000	40	1.991.548.350	60	2.041.337.059	80	2.092.370.485	100	2.144.679.747	100	10.212.909.641	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat kepuasan pegawai terhadap peningkatan kapasitas SDM RS	Persen	80	85	230.565.500	100	236.329.638	100	242.237.878	100	248.293.825	100	254.501.171	100	1.211.928.012	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	persen	70	75	1.024.930.210	80	1.050.553.465	85	1.076.817.302	90	1.103.737.734	95	1.131.331.178	95	5.387.369.889	DINAS KESEHATAN
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Rumah Tangga Ber PHBS	Persen	41.27	50	599.126.514	55	614.104.677	60	629.457.293	65	645.193.726	70	661.323.569	70	3.149.205.779	DINAS KESEHATAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Berwawasan Kependudukan	Persen	n/a	53.00	245.000.000	55.00	251.125.000	57.00	257.403.125	59.00	263.838.203	61.00	270.434.158	61.00	1.287.800.486	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Unmeet need KB	Persen	9.16	8.25	2.039.666.667	8.00	2.090.658.333	7.70	2.142.924.792	7.40	2.196.497.911	7.00	2.251.410.359	7.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pencapaian pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	63.39	65.00	2.039.666.667	67.00	2.090.658.333	68.00	2.142.924.792	69.00	2.196.497.911	70.00	2.251.410.359	70.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio akseptor KB	Persen	73.70	74.00	2.039.666.667	74.30	2.090.658.333	74.50	2.142.924.792	74.80	2.196.497.911	75.00	2.251.410.359	75.00	10.721.158.062	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang ber-KB mandiri	Persen	82.74	82.90	115.000.000	83.00	117.875.000	83.10	120.821.875	83.20	123.842.422	83.30	126.938.483	83.30	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	Persen	80.92	81.30	115.000.000	81.50	117.875.000	81.60	120.821.875	81.80	123.842.422	82.00	126.938.483	82.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	Persen	71.94	72.30	115.000.000	72.50	117.875.000	72.60	120.821.875	72.80	123.842.422	73.00	126.938.483	73.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	Persen	77.23	78.00	115.000.000	78.30	117.875.000	78.50	120.821.875	78.80	123.842.422	79.00	126.938.483	79.00	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa	Persen	90.0	90.9	115.000.000	90.9	117.875.000	90.9	120.821.875	90.9	123.842.422	100	126.938.483	100	604.477.780	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/O rang/Tahun	9.500	12.000	6.746.152.726	24.000	6.914.806.544	32.500	7.087.676.707	44.000	7.264.868.625	52.000	7.446.490.344	52.000	35.459.994.946	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP	persen	14.37	15.19	45.000.000	15.55	46.125.000	15.90	47.278.125	16.25	48.460.078	16.61	49.671.580	16.61	236.534.783	DINAS PERDAGANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

	Toko (IKK Outcome)															
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	persen	71.43	73.32	6.000.000.000	75.09	6.150.000.000	76.68	6.303.750.000	78.63	6.461.343.750	80.41	6.622.877.344	80.41	31.537.971.094	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase obyek sasaran pengawasan barang beredar dan pemantauan harga yang terlaksana pemantauanya	persen	2	3	50.000.000	5	51.250.000	6	52.531.250	7	53.844.531	8	55.190.645	8	262.816.426	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase Peningkatan Volume Ekspor	Persen	2	3	75.000.000	5	76.875.000	7	78.796.875	8	80.766.797	9	82.785.967	9	394.224.639	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat ukur, timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku (IKK Outcome)	Persen	76.78	79.08	59.976.000	83.69	61.475.400	85.99	63.012.285	88.29	64.587.592	88.29	66.202.282	88.29	315.253.559	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	persen	N/A	1.50	150.000.000	2	153.750.000	2.5	157.593.750	3.00	161.533.594	3.50	165.571.934	3.50	788.449.278	DINAS PERDAGANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Ketersediaan Pangan Terhadap Kebutuhan Masyarakat	persen	135	100	75.180.842	100	77.060.363	100	78.986.872	100	80.961.544	100	82.985.583	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan stabilitas pasokan dan harga pangan	persen	3.4	3.6	75.180.84 ₂	3.8	77.060.36 ₃	4	78.986.87 ₂	4.2	80.961.54 ₄	4.4	82.985.58 ₃	4.4	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Konsumsi Energi dan Protein Terhadap Standar Nasional	persen	100	100	75.180.84 ₂	100	77.060.36 ₃	100	78.986.87 ₂	100	80.961.54 ₄	100	82.985.58 ₃	100	395.175.204	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Capaian Analisis Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan	persen	100	100	90.000.00 ₀	100	92.250.00 ₀	100	94.556.25 ₀	100	96.920.15 ₆	100	99.343.16 ₀	100	473.069.566	DINAS KETAHANAN PANGAN
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase PSAT yang memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	persen	85	85	50.634.20 ₀	85	51.900.05 ₅	85	53.197.55 ₆	85	54.527.49 ₅	85	55.890.68 ₃	85	266.149.989	DINAS KETAHANAN PANGAN
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	58,96	59,12	1.715.000.000	59,58	1.757.875.000	59,87	1.801.821.875	60,12	1.846.861.423	60,55	1.893.039.108	60,55	9.014.597.406	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD	Persen	20	23	280.000.000	25	287.000.000	27	294.175.000	30	301.523.375	35	309.067.609	35	1.471.765.984	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Korban Kekerasan Perempuan yang Terlayani	Persen	100	100	275.000.000	100	281.875.000	100	288.921.875	100	296.144.922	100	303.548.545	100	1.445.490.342	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase kelurahan dan atau kecamatan yang mengikuti evaluasi GSIB	Persen	n/a	29.03	250.000.000	35.16	256.250.000	41.29	262.656.250	50.65	269.222.656	60.00	275.953.223	60.00	1.314.082.129	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data gender dan anak	Persen	n/a	100	150.000.000	100	153.750.000	100	157.593.750	100	161.533.594	100	165.571.934	100	788.449.278	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Dekelara (desa/kelurahan, Kecamatan layak anak)	Persen	22.22	29.63	500.000.000	33.33	512.500.000	40.74	525.312.500	48.15	538.445.313	55.56	551.906.445	55.56	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani Instansi Terkait Kabupaten	Persen	100	100	260.000.000	100	266.500.000	100	273.162.500	100	279.991.563	100	286.991.352	100	1.366.645.415	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	50	55	1.382.953.542	60	1.417.527.381	65	1.452.965.565	70	1.489.289.705	75	1.526.521.947	75	7.269.258.140	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan yang aktif	Persen	50	50	529.394.800	58	542.629.670	67	556.195.411	75	570.100.297	75	584.352.804	75	2.782.672.982	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persen	100	100	12.425.160	100	12.735.789	100	13.054.184	100	13.380.538	100	13.715.052	100	65.310.723	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	Persen	100	100	300.000.000	100	307.500.000	100	315.187.500	100	323.067.188	100	331.143.867	100	1.576.898.555	DINAS SOSIAL
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Keluarga Miskin Yang Memperoleh Perlindungan dan Layanan Jaminan Sosial	Persen	62,67	58,46	400.268.902	56,69	410.275.625	55,12	420.532.515	53,73	431.045.828	52,49	441.821.974	52,49	2.103.944.844	DINAS SOSIAL
			Kondisi	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada	Perangkat	

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kinerja Awal RPJMD	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Akhir Periode RPJMD		Daerah Penanggung Jawab
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Yang Mendapat Perlindungan dan Jaminan Sosial (SPM)	Persen	N/A	100	132.946.880	100	136.270.552	100	139.677.316	100	143.169.249	100	146.748.480	100	698.812.477	DINAS SOSIAL
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Peningkatan Pihak Yang Berperan Aktif Dalam Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persen	100	100	7.917.800	100	8.115.745	100	8.318.639	100	8.526.605	100	8.739.770	100	41.618.559	DINAS SOSIAL
Mewujudkan daerah yang beradab dengan																
mengedepankan pendekatan Agama, Budaya dan kearifan lokal																
Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban sosial, keteladanan dan kehidupan beragama yang kondusif dan terpelihara	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	N/A	100	7.144.258.876	100	7.322.865.349	100	7.505.936.982	100	7.693.585.406	100	7.885.925.041	100	37.552.571.654	
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks kriminalitas	Persen	N/A	100	7.144.258.876	100	7.322.865.349	100	7.505.936.982	100	7.693.585.406	100	7.885.925.041	100	37.552.571.654	
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Potensi Konflik SARA yang tertangani	Persen	N/A	100	29.967.300	100	30.716.483	100	31.484.395	100	32.271.504	100	33.078.292	100	157.517.974	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu	Persen	100	100	720.545.921	100	738.559.569	100	757.023.558	100	775.949.147	100	795.347.876	100	3.787.426.071	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang terbina	Persen	100	100	431.090.000	100	441.867.250	100	452.913.931	100	464.236.780	100	475.842.699	100	2.265.950.660	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Rencana Aksi P4GN yang terimplementasikan	Persen	100	100	29.487.700	100	30.224.893	100	30.980.515	100	31.755.028	100	32.548.903	100	154.997.039	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang tertangani	Persen	100	100	55.000.000	100	56.375.000	100	57.784.375	100	59.228.984	100	60.709.709	100	289.098.068	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	5.171.967.955	100	5.301.267.154	100	5.433.798.833	100	5.569.643.804	100	5.708.884.899	100	27.185.562.645	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 1 Layanan Wilayah Mmanajemen Kebakaran	Persen	100	100	706.200.000	100	723.855.000	100	741.951.375	100	760.500.159	100	779.512.663	100	3.712.019.197	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
Mewujudkan daya saing ekonomi daerah																		
berbasis inovasi dan potensi Lokal																		
Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi	Indeks Gini	Persen	0,36	0,32	39.661.866.962	0,28	40.727.008.624	0,25	41.870.600.726	0,2	42.941.661.826	0,19	44.038.792.212	0,19	209.239.930.350			
Meningkatnya pertumbuhan sektor sektor unggulan daerah	Pertumbuhan ekonomi	Persen	-2,08	5,0-5,5%	38.854.293.962	5,5-5,6%	39.899.246.299	5,6-5,7%	41.022.144.343	5,7-5,8%	42.071.994.032	5,8-6,0%	43.147.382.725	5,8-6,0%	204.995.061.361			
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Permohonan Izin Usaha Simpan Pinjam yang memenuhi syarat	persen	100	100	15.000.000	100	15.375.000	100	15.759.375	100	16.153.359	100	16.557.193	100	78.844.927	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN		

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diawasi dan diperiksa	persen	17	19	30.000.00 0	21	30.750.00 0	23	31.518.75 0	25	32.306.71 9	30	33.114.38 7	30	157.689.8 56	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP yang sehat	Persen	9.5	10	25.000.00 0	11	25.625.00 0	12	26.265.62 5	15	26.922.26 6	20	27.595.32 2	20	131.408.2 13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Persen	7	9	50.000.00 0	10	51.250.00 0	12	52.531.25 0	14	53.844.53 1	15	55.190.64 5	15	262.816.4 26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kab.	Persen	5	5	30.000.00 0	7	30.750.00 0	8	31.518.75 0	10	32.306.71 9	15	33.114.38 7	15	157.689.8 56	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang diberdayakan	Persen	5	5	85.000.00 0	5	87.125.00 0	5	89.303.12 5	5	91.535.70 3	5	93.824.09 6	5	446.787.9 24	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	25	25	1.401.516.944	25.5 Persen	1.436.554.868	26.2 Persen	1.472.468.739	26.8 Persen	1.509.280.458	27.5 Persen	1.547.012.469	27.5 Persen	7.366.833.478	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK (IKK Outcome)	Persen	5	10	593.936.000	10	608.784.400	15	624.004.010	20	639.604.110	25	655.594.213	25	3.121.922.733	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan pengawasan dengan Jumlah izin usaha industri (IU) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	100	100	20.000.000	100	20.500.000	100	21.012.500	100	21.537.813	100	22.076.258	100	105.126.571	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan informasi industri	Persen	100	100	66.434.000	100	68.094.850	100	69.797.221	100	71.542.152	100	73.330.706	100	349.198.929	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan produksi perikanan tangkap	Persen	4.42	5.88	4.985.671.701	11.76	5.110.313.493	17.65	5.238.071.331	23.53	5.369.023.114	29.41	5.503.248.692	29.41	26.206.328.331	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kenaikan cakupan bina kelompok nelayan	Persen	3.33	6.45	99.880.000	12.9	102.377.000	19.35	104.936.425	25.81	107.559.836	32.26	110.248.832	32.26	525.002.093	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase kenaikan produksi budidaya	Persen	1.87	1.96	3.148.841.741	3.92	3.227.562.785	5.88	3.308.251.854	7.84	3.390.958.151	9.8	3.475.732.104	9.8	16.551.346.635	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan produksi olahan hasil perikanan	Persen	1.22	1.22	773.946.580	2.24	793.295.245	3.36	813.127.626	4.48	833.455.816	5.56	854.292.212	5.56	4.068.117.479	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase kenaikan Komsumsi ikan daerah	Persen	2.50	2.44	50.000.00 0	4.88	51.250.00 0	7.32	52.531.25 0	9.76	53.844.53 1	12.20	55.190.64 5	12.20	262.816.4 26	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	90	90	242.444.8 09	95	223.037.5 92	95	270.419.1 61	95	285.278.3 33	95	300.273.2 37	95	1.321.453. 132	DINAS PERKEBUNAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Sarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	3.715.415. 180	100	3.808.300. 560	100	3.903.508. 073	100	4.001.095. 775	100	4.101.123. 170	100	19.529.44 2.758	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	Persen	N/A	90	2.802.742. 791	90	2.872.811. 361	90	2.944.631. 645	95	3.018.247. 436	100	3.093.703. 622	100	14.732.13 6.855	DINAS PERKEBUNAN	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rasio Ketersediaan Prasarana Pertanian Sesuai Kebutuhan	Persen	100	100	6.539.733. 179	100	6.703.226. 508	100	6.870.807. 171	100	7.042.577. 350	100	7.218.641. 784	100	34.374.98 5.992	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	100	100	124.883.8 55	100	128.005.9 51	100	131.206.1 00	100	134.486.2 53	100	137.848.4 09	100	656.430.5 68	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase penurunan penyebaran OPT pada tanaman perkebunan	Persen	70	75	16.795.60 8	75	17.215.49 8	80	17.645.88 6	80	18.087.03 3	85	18.539.20 9	85	88.283.23 4	DINAS PERKEBUNAN	
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persen	100	100	39.189.75 2	100	40.169.49 6	100	41.173.73 3	100	42.203.07 7	100	43.258.15 3	100	205.994.2 11	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN	
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase perizinan usaha pertanian	Persen	75	75	242.444.8 09	75	223.037.5 92	80	270.419.1 61	80	285.278.3 33	85	300.273.2 37	85	1.321.453. 132	DINAS PERKEBUNAN	

PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Perizinan Usaha Pertanian	Persen	N/A	100	101.636.800	100	104.177.720	100	106.782.163	100	109.451.717	100	112.188.010	100	534.236.410	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase penyuluhan dan kelompok tani terbina	Persen	85	85	242.444.809	90	223.037.591	90	270.419.160	90	285.278.332	95	300.273.238	95	1.321.453.130	DINAS PERKEBUNAN
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Penyuluh Dan Kelompok Tani Terbina	Persen	100	100	796.458.404	100	816.369.864	100	836.779.111	100	857.698.588	100	879.141.053	100	4.186.447.020	DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, DAN PETERNAKAN
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Persen	2.2	2.3	9.500.000.000	2.4	9.737.500.000	2.5	9.980.937.500	2.5	10.230.460.938	2.6	10.486.222.461	2.6	49.935.120.899	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	N/A	20	690.000.000	25	707.250.000	40	724.931.250	45	743.054.531	50	761.630.895	50	3.626.866.676	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Jumlah pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk bereksprese, berpromosi dan berinteraksi	Kelompok	1	5	150.000.000	8	153.750.000	11	157.593.750	14	161.533.594	16	165.571.934	16	788.449.278	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku EKRAF yang terfasilitasi untuk pengembangan kompetensi tingkat dasar	Persen	N/A	N/A	0	15	150.000.000	20	153.750.000	25	157.593.750	30	161.533.594	30	622.877.344	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Presentase Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan	Persen	100	100	1.000.000.000	100	1.025.000.000	100	1.050.625.000	100	1.076.890.625	100	1.103.812.891	100	5.256.328.516	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	Kelompok	8	8	250.000.000	6	256.250.000	6	262.656.250	7	269.222.656	7	275.953.223	7	1.314.082.129	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase pembinaan Pelestarian Sejarah Menuju Perkembangan Obyek Wisata Budaya	Persen	10	20	912.877.000	20	935.698.925	25	959.091.398	30	983.068.683	35	1.007.645.400	35	4.798.381.406	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase pengunjung museum	Persen	2.3	3.3	112.000.000	4.3	114.800.000	5.3	117.670.000	6.3	120.611.750	7.3	123.627.044	7.3	588.708.794	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Meningkatnya Investasi Daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	15	807.573.000	15	827.762.325	15	848.456.383	15	869.667.794	15	891.409.487	15	4.244.868.989	
Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Nilai Investasi	Miliar Rupiah	310	325	300.000.000	340	307.500.000	355	315.187.500	360	323.067.188	375	331.143.867	375	1.576.898.555	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Peningkatan Investor	Investor	35	39	70.000.000	44	71.750.000	51	73.543.750	59	75.382.344	65	77.266.902	65	367.942.996	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Persen	100	100	90.000.000	100	92.250.000	100	94.556.250	100	96.920.156	100	99.343.160	100	473.069.566	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal	Persen	50	50	322.573.000	50	330.637.325	50	338.903.258	50	347.375.840	50	356.060.236	50	1.695.549.659	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Laporan Data Base Perizinan dan Non Perizinan	Persen	100	100	25.000.000	100	25.625.000	100	26.265.625	100	26.922.266	100	27.595.322	100	131.408.213	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
---	--	--------	-----	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	------------	-----	-------------	--

Misi / Tujuan / Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan / Impact/ Outome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Mengentaskan Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,4	6	2.790.240.000	5,5	2.859.996.000	5	2.931.495.901	4,5	3.004.783.299	4	3.079.902.880	4	14.666.418.080	
Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	Tingkat pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,89	2,75	368.240.000	2,49	377.446.000	2,27	386.882.151	2,05	396.554.204	2	406.468.059	2	1.935.590.414	
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	persen	N/A	20	25.000.000	20	25.000.000	20	27.000.000	22	27.000.000	25	27.000.000	25	131.000.000	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan Pelatihan Kerja	persen	62	68	106.600.000	70	109.265.000	75	111.996.625	80	114.796.541	85	117.666.454	85	560.324.620	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	0.93	21	190.140.000	23	194.893.500	25	199.765.838	27	204.759.983	29	209.878.983	29	999.438.304	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)	persen	44	46	46.500.000	46	48.287.500	47	48.119.688	48	49.997.680	49	51.922.622	49	244.827.490	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Meningkatnya Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,611 (Berke mbang)	0,624 (Berke mbang)	2.422.000.000	0,645 (Berke mbang)	2.482.550.000	0,687 (Berke mbang)	2.544.613.750	0,7 (Berke mbang)	2.608.229.095	0,707 (Maju)	2.673.434.821	0,707 (Maju)	12.730.827.666	
PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa yang memiliki penataan desa yang berkualitas	persen	N/A	50	500.000.000	60	512.500.000	70	525.312.500	80	538.445.313	90	551.906.445	90	2.628.164.258	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
SEKRETARIAT DAERAH**

**BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN MAMUJU**

Nomor SOP	065/ 534 / I / 2024
Tanggal Pembuatan	30 Januari 2024
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU  H. SUAIB, S.Sos., MM Pembina Utama Muda NIP. 19661007 198703 1 011
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ul style="list-style-type: none">- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1 S-1 Sederajat2 Mampu mengoperasikan program komputer (MS Word, Excel dan Internet)3 Memiliki tingkat ketelitian yang baik4 Memiliki kemampuan terkait mekanisme pembuatan laporan6 Memiliki kemampuan berkomunikasi dan dapat bekerja dalam tim

Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
<ul style="list-style-type: none">- SOP Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Mamuju	<ol style="list-style-type: none">1 Jaringan Internet2 Komputer3 Printer4 ATK5 Flask Disc

Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan LKjIP paling lambat diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku- Dibuat time schedule terkait proses penyusunan LKjIP	Data - data dari SKPD diolah dan hasilnya dicetak untuk dijadikan Dokumen Laporan Kinerja.

**REALISASI TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2023
KABUPATEN MAMUJU**

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
			Target	Realisasi	
Meningkatnya kinerja keuangan dan pengawasan	Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	CC	75
	Indeks Pengelolaan keuangan Daerah	Predikat	Baik	Baik	100
	Nilai LPPD	Skor	Sangat Tinggi	rendah	50
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Skor	90	78,75	87,50
Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Persen	60	97	161
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	Persen	60	80	133
Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	80	77,64	97
	Indeks Resiko Bencana	Predikat	Tinggi	Tinggi	100
Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan Pendidikan, Kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya	Indeks Pembangunan Manusia	Persen	68,50	71,07	103
	Indeks Pendidikan	Skala	0,36	0,64	177
	Indeks Kesehatan	Skala	0,556	0,748	134
	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang disesuaikan (Daya Beli)	Ribu Rupiah/Orang/Tahun	24.000	10.075	42
	Indeks Pemberdayaan Gender	Persen	59,58	60,59	101
	Indeks Kesejahteraan Sosial	Persen	60	53	88
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Indeks ketentraman dan ketertiban	Persen	100	99,57	99
	Indeks Kriminilitas	Persen	100	,99,57	99
Meningkatnya pertumbuhan sektor-sektor unggulan daerah	Indeks Gini	Persen	0,28	0,37	75
	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5.5-5.6%	4,37	78
Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Investasi	Persen	15	68,27	455
Meningkatnya Penyerapan Tenaga Kerja	Persentase Penduduk Miskin	Persen	5,5	7,57	72
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,49	2,99	83
Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa Membangun	Skala	0,695 (Berkembang)	0,660 (Berkembang)	95



PANTAI MANAKARRA

